

Katalog BPS : 9201001.8271

INDIKATOR EKONOMI KOTA TERNATE 2017

Badan Pusat Statistik Kota Ternate

INDIKATOR EKONOMI KOTA TERNATE 2017

No. Katalog : 9201001.8271
No. Publikasi : 82710.1812
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 132
Naskah : BPS Kota Ternate
Penyunting : BPS Kota Ternate
Gambar Kulit : BPS Kota Ternate
Diterbitkan oleh : BPS Kota Ternate
Dicetak oleh :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Pada era informasi saat ini data telah menjadi kebutuhan utama berbagai pihak yang banyak digunakan untuk perencanaan, pengendalian serta evaluasi berbagai kegiatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penanggung jawab perstatistikan di Indonesia mempunyai tugas menyediakan data berkualitas bagi kebutuhan berbagai bidang pembangunan sebagai salah satu dari wujud pertanggung jawaban tersebut.

Pembangunan di bidang ekonomi di mana merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai tingkatan membutuhkan data yang dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan berbagai programnya dilaksanakan .

Publikasi Indikator Ekonomi Kota Ternate 2017 ini secara umum mencerminkan perekonomian Kota Ternate selama tahun 2017 yang dilengkapi dengan penjelasan teknis untuk memudahkan analisa bagi pengguna data. Publikasi ini masih memiliki keterbatasan terutama dalam cakupan datanya, untuk itu pada penerbitan mendatang akan diupayakan memperluas cakupannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan terutama kepada Bappeda Kota Ternate atas bantuan dan kerjasamanya dalam penerbitan publikasi ini..

Ternate, September 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Ternate

Ir. NURHIDAYAT MASKAT, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
 BAB I INDEKS HARGA DAN LAJU INFLASI	 2
1.1. Penjelasan Teknis	2
1.2. Gambaran Umum	7
 BAB II PERKEMBANGAN EKONOMI	 24
2.1. Perkembangan Ekonomi Sektoral	25
2.2. Peranan Sektor Ekonomi	49
 BAB III PEMBANGUNAN MANUSIA	 56
3.1. Konsep Pembangunan Manusia.....	56
3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	58
3.3. Dimensi/Komponen Pembangunan Manusia.....	59
3.4. Mengukur Kecepatan IPM	69
3.5. Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Ternate.....	69
 BAB IV PERBANKAN	 83
4.1. Perkembangan Asset Bank Umum	83
4.2. Penghimpunan Dana Bank Umum dan BPR.....	84
 BAB V HOTEL DAN PARIWISATA	 90
5.1. Perkembangan Perhotelan	90
5.2. Tingkat Penghunian Kamar (TPK)	91
5.3. Rata-rata Lama Menginap	92

	Halaman
BAB VI PERHUBUNGAN	98
6.1. Perhubungan Darat	98
6.2. Perhubungan Laut	99
6.3. Perhubungan Udara	101
6.4. Komunikasi	102
BAB VII PRODUKSI	111
7.1. Produksi Tanaman Pangan.....	111
7.2. Tanaman Perkebunan.....	112
7.3. Populasi Ternak dan Unggas.....	112
7.4. Produksi Perikanan.....	113
BAB VIII KEUANGAN DAERAH.....	124
8.1. Penjelasan Teknis	124
8.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ternate.....	126
DAFTAR PUSTAKA	xii

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Ternate menurut Kelompok Komoditi Tahun 2017 (2012=100)	15
1.2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Ternate dan Nasional Menurut Bulan Tahun 2017 (2012=100)	21
1.3. Laju Inflasi Kota Ternate dan Nasional menurut Bulan Tahun 2016 – 2017	22
2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Ternate menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2011-2016	51
2.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Ternate menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2011-2016	52
2.3. Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Ternate menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2016	53
2.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Ternate menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2016	54
3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2017	77
3.2. Angka Harapan Hidup Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017 (Tahun)	78
3.3. Harapan Lama Sekolah Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2017 (Tahun)	79

3.4.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017 (Tahun)	80
3.5.	Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017 (Ribu Rupiah)	81
4.1.	Jumlah Aktiva Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Dati II di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017 (Juta Rp)	87
4.2.	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah & Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Simpanan di Kota Ternate Tahun 2015– 2017 (Juta Rp)	88
5.1.	Jumlah Hotel/Penginapan dan Kamar Menurut Kecamatan di Kota Ternate, 2017	94
5.2.	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) menurut Klasifikasi Hotel/Akomodasi di Kota Ternate, 2017	95
5.3.	Rata-rata Lama Menginap Tamu (Asing dan Domestik) Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya di Kota Ternate Dirinci Menurut Kelompok Kamar Tahun 2017	96
6.1.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kota Ternate, 2017 (Km)	104
6.2.	Lalu Lintas Penumpang dan Barang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate Tahun 2017	105
6.3.	Jumlah Penumpang Datang dan Berangkat Melalui Bandara Sultan Babullah Ternate Tahun 2014 – 2017 (Orang)	106
6.4.	Jumlah Bagasi dan Kargo yang Dibongkar/ Dimuat Melalui Bandara Sultan Babullah Ternate Tahun 2014 – 2017 (Kg)	106

Tabel	Halaman
6.5. Banyaknya Pesawat Datang dan Berangkat Melalui Bandara Sultan Babullah Ternate Tahun 2014 – 2017	108
6.6. Jumlah Surat Dalam Negeri yang Dikirim dan Diterima Kantor Pos dan Giro Ternate Tahun 2017	109
7.1. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2017	115
7.2. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2017	116
7.3. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2017	117
7.4. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2017	118
7.5. Luas Areal Tanaman Menghasilkan Menurut Jenis Komoditi Perkebunan di Kota Ternate Tahun 2017 (Ha)	119
7.6. Banyaknya Rumah Tangga Pemilik Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditi di Kota Ternate Tahun 2015	120
7.7. Populasi Ternak dan Unggas Dirinci Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2016 - 2017 (ekor)	121
7.8. Perkembangan Produksi Perikanan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2013 – 2017 (Ton)	122
8.1. Ringkasan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2017 (Rupiah)	129
8.2. Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Ternate Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2017 (Rupiah)	130

Tabel

Halaman

8.3.	Ringkasan Anggaran Belanja Daerah Kota Ternate Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2017 (Rupiah)	131
8.4.	Ringkasan Pembiayaan Daerah Kota Ternate Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2017 (Rupiah)	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Laju Inflasi Tahunan Kota Ternate, 2014 – 2017	7
1.2. Laju Inflasi/Deflasi Kota Ternate, 2017	8
1.3. Perbandingan Laju Inflasi Bulanan Kota Ternate, 2016-2017 ..	9
1.4. Laju Inflasi Kalender menurut Kelompok Pengeluaran Kota Ternate, 2017	10
2.1. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori A (%), 2011-2016	25
2.2. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori B (%), 2011-2016	27
2.3. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori C (%), 2011-2016	28
2.4. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori D (%), 2011-2016	29
2.5. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori E (%), 2011-2016	30
2.6. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori F (%), 2011-2016	32
2.7. Peranan Subkategori G (%), 2011-2016	33
2.8. Laju Pertumbuhan Kategori dan Subkategori G (%), 2011-2016	34
2.9. Peranan Subkategori H (%), 2011-2016	36

Gambar	Halaman
2.10. Laju Pertumbuhan Subkategori H (%), 2011-2016	37
2.11. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori I (%), 2011-2016	38
2.12. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori J (%), 2011-2016	39
2.13. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori K (%), 2011-2016	40
2.14. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori L (%), 2011-2016	42
2.15. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori M,N (%), 2011-2016	43
2.16. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori O (%), 2011-2016	44
2.17. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori P (%), 2011-2016	46
2.18. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Q (%), 2011-2016	47
2.19. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori R,S,T,U (%), 2011-2016	48
2.20. Peranan PDRB menurut Kategori Lapangan Usaha (%), 2016 .	50
3.1. Perbandingan IPM Kab/Kot se-Provinsi Maluku Utara, 2017	70
3.2. Perkembangan IPM Kota Ternate, 2011-2017	71
3.3. Angka Harapan Hidup Kota Ternate (tahun), 2011-2017	72
3.4. Perkembangan EYS dan MYS Kota Ternate (tahun), 2011-2017	73

Gambar	Halaman
3.5. Pengeluaran per Kapita Kota Ternate, 2011-2017	75
3.6. Pertumbuhan IPM Kota Ternate (%), 2011-2017	76
4.1. Posisi Simpanan Masyarakat (Rupiah dan Valas) menurut Jenis simpanan pada Bank Umum dan BPR di Kota Ternate, 2013-2017 (Milliar Rupiah)	84
4.2. Kontribusi Jenis Simpanan (Giro, Tabungan, Deposito) terhadap Total Simpanan di Kota Ternate, 2017 (persen)	86
5.1. TPK Kota Ternate menurut Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya, 2017	91
5.2. Rata-Rata Lama Menginap Tamu di Kota Ternate menurut Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya, 2017	92
6.1. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Ternate (km), 2017	98
6.2. Lalu Lintas Penumpang Angkutan Laut di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate (orang), 2017	99
6.3. Arus Bongkar Muat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate (ton), 2017	100
6.4. Arus Penumpang melalui Bandar Udara Sultan Babullah Ternate (orang), 2017	101
6.5. Persentase Penerimaan dan Pengiriman Surat dan Paket di Kota Ternate (persen), 2017	103
7.1. Produksi Jagung menurut Kecamatan di Kota Ternate (ton), 2017	111
7.2. Produksi Perikanan dan Pertumbuhan di Kota Ternate, 2012- 2017	114
8.1. Presentase Komponen pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Ternate, Tahun 2017	127

BAB 1 INDEKS HARGA DAN LAJU INFLASI

I. INDEKS HARGA DAN LAJU INFLASI

1.1. Penjelasan Teknis

Harga konsumen adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen) secara eceran dengan pembayaran tunai. Eceran yang dimaksud adalah membeli suatu barang atau jasa dengan menggunakan satuan terkecil untuk dipakai/dikonsumsi.

Pedagang Eceran adalah pihak atau seseorang yang menjual barang atau jasa kepada pembeli untuk dikonsumsi, bukan untuk diperdagangkan lagi.

Kualitas/merek barang adalah merupakan spesifikasi barang. Satu macam barang dan jasa umumnya mempunyai lebih dari satu kualitas/merk seperti mie instant indomie, supermi dan lain – lain.

Nilai konsumsi adalah jumlah nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditi untuk dikonsumsi. Nilai konsumsi suatu komoditi merupakan perkalian harga komoditi dengan kuantitas (banyaknya) yang dikonsumsi pada periode dasar.

Survei harga konsumen (SHK) adalah survei yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Output dari survei ini digunakan untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara umum, SHK mencakup 225-462 jenis barang dan jasa hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang diwakili oleh 1-3 kualitas/merek

untuk setiap komoditas. Periode pencacahan SHK terdiri dari harian, mingguan, dua mingguan dan bulanan.

Dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) ada 2 jenis nilai konsumsi, yang pertama adalah **nilai konsumsi dasar (*PoQo*)** yang diperoleh dari hasil Survei Biaya Hidup (SBH), yaitu rata – rata nilai pengeluaran rumah tangga sebulan untuk setiap jenis barang/jasa yang dikonsumsi, yang kedua adalah **nilai konsumsi pada bulan berjalan (*PnQo*)** yang diperoleh dari hasil perkalian harga bulan berjalan dengan kuantitas konsumsi pada tahun dasar. Didalam penghitungan dilakukan secara bertahap dengan jalan menggunakan relatif harga (RH).

Relatif harga adalah rasio perbandingan harga suatu komoditi pada suatu periode waktu tertentu terhadap harga pada periode sebelumnya.

Paket komoditi adalah jenis barang/jasa yang termasuk dalam diagram timbang hasil Survei Biaya Hidup (SBH). Beberapa kriteria penentuan komoditi yang muncul dalam paket komoditas ini adalah :

- a. Jenis barang dan jasa tersebut mempunyai persentase nilai konsumsi terhadap total konsumsi rumah tangga, minimum sebesar 0,02 persen.
- b. Barang dan jasa tersebut dikonsumsi secara luas oleh masyarakat kota yang bersangkutan/daerah tersebut.
- c. Harganya dapat dipantau secara terus menerus dalam jangka waktu yang relatif lama.

Paket komoditi ini dibagi kedalam 7 (tujuh) kelompok dan 35 (tiga puluh lima) sub kelompok dengan rincian :

I. Kelompok Bahan Makanan

Dengan sub kelompok :

1. Padi-padian, umbi-umbian dan hasil-hasilnya
2. Daging dan hasil-hasilnya
3. Ikan segar
4. Ikan diawetkan
5. Telur, susu dan hasil-hasilnya
6. Sayur-sayuran
7. Kacang-kacangan
8. Buah-buahan
9. Bumbu-bumbuan
10. Lemak dan minyak
11. Bahan makanan lainnya

II. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Dengan sub kelompok :

1. Makanan jadi
2. Minuman yang tidak beralkohol
3. Tembakau dan minuman yang beralkohol

III. Kelompok Perumahan

Dengan sub kelompok :

1. Biaya tempat tinggal
2. Bahan bakar, penerangan dan air
3. Perlengkapan rumahtangga
4. Penyelenggaraan rumahtangga

IV. Kelompok Sandang

Dengan sub kelompok :

1. Sandang laki-laki
2. Sandang wanita
3. Sandang anak-anak
4. Barang pribadi dan sandang lainnya

V. Kelompok Kesehatan

Dengan sub kelompok :

1. Jasa kesehatan
2. Obat – obatan
3. Jasa perawatan jasmani
4. Perawatan jasmani dan kosmetik

VI. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan olahraga

Dengan sub kelompok :

1. Jasa pendidikan
2. Kursus/pelatihan
3. Perlengkapan/peralatan pendidikan
4. Rekreasi
5. Olahraga

VII. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Dengan sub kelompok :

1. Transportasi
2. Komunikasi dan pengiriman
3. Sarana dan penunjang transpor
4. Jasa keuangan

Diagram timbang adalah diagram yang menunjukkan persentase nilai konsumsi tiap-tiap jenis barang/jasa terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga disuatu kota. Diagram timbang tersebut juga mencerminkan pola konsumsi rumah tangga dikota tersebut.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Formula indeks yang digunakan untuk menghitung IHK masing-masing kota adalah **Formula Laspeyres** dengan modifikasi sebagai berikut :

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} (P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i})}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100$$

Dimana :

- IHK_n = Indeks Harga Konsumen bulan ke (n)
- P_{ni} = Harga jenis barang/jasa i , bulan ke (n)
- $P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang/jasa i , bulan ke (n-1)
- $P_{0i} \cdot Q_{0i}$ = Nilai konsumsi (NK) jenis barang/jasa i pada tahun dasar
- k = Jumlah jenis barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas IHK

Laju Inflasi/deflasi adalah perubahan indeks dari waktu ke waktu. Laju inflasi/deflasi bulanan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$Inf_n = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100$$

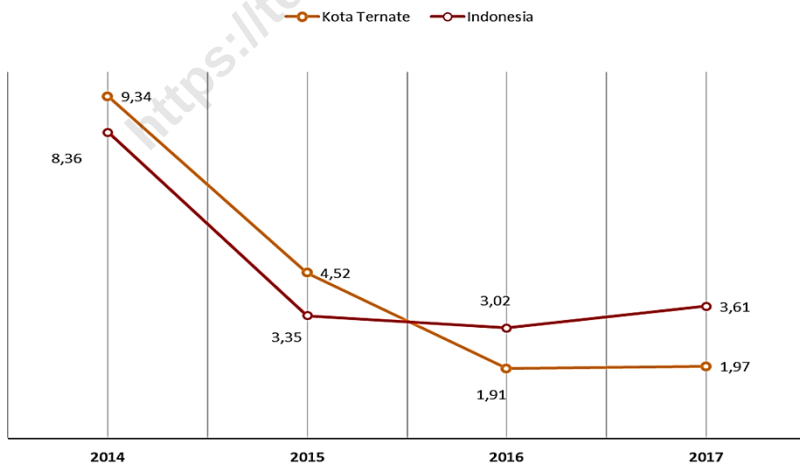
Dimana :

Inf_n	=	Laju inflasi/deflasi bulan ke (n)
IHK_n	=	Indeks harga konsumen bulan ke (n)
IHK_{n-1}	=	Indeks harga konsumen bulan ke (n-1)

1.2. Gambaran Umum

Pada bab ini akan diuraikan mengenai perkembangan indeks harga konsumen dan laju inflasi Kota Ternate sebagai bahan kajian dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Ternate. Secara umum, Laju inflasi di Kota Ternate sangat berfluktuatif.

Gambar 1.1. Laju Inflasi Tahunan Kota Ternate, 2014-2017

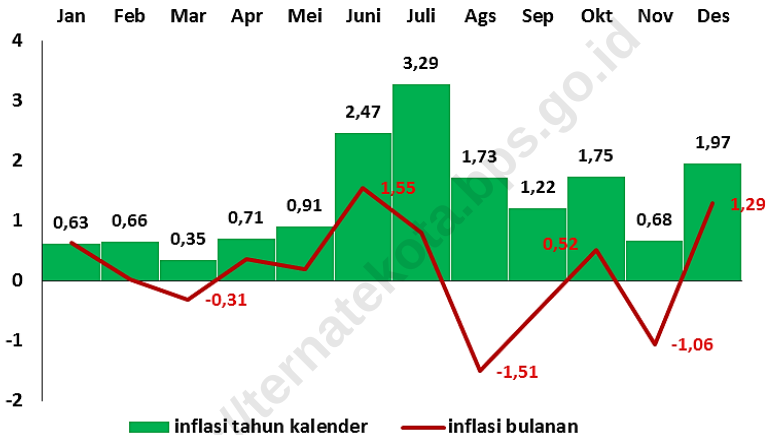


Sumber : BPS, diolah

Pada tahun 2017, Kota Ternate mengalami inflasi y-o-y (Desember 2017 terhadap Desember 2016) sebesar 1,97 persen. Jika

dibandingkan dengan tahun 2016, inflasi tahun 2017 lebih tinggi sebesar 0,06 persen. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 1.1.

Gambar 1.2. Laju Inflasi/Deflasi Kota Ternate, 2017

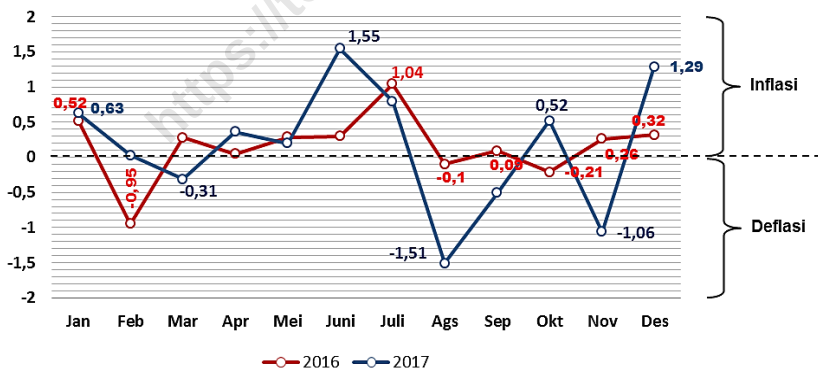


Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa laju inflasi bulanan di Kota Ternate pada tahun 2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, Kota Ternate mengalami deflasi pada Bulan Maret, Agustus, September, dan November. Deflasi terbesar terjadi pada Bulan Agustus 2017 yakni sebesar 1,51 persen. Kembali normalnya harga barang dan jasa di Kota Ternate pasca Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri menjadi faktor utama terjadinya deflasi di Bulan Agustus ini. Selain deflasi, tahun 2017 Kota Ternate juga mengalami fenomena inflasi. Fenomena inflasi tahun 2017 terjadi pada Bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, Oktober, dan Desember. Inflasi tertinggi terjadi pada Bulan Juni, dimana pada bulan ini harga barang dan jasa meningkat bersamaan dengan momentum Puasa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Selain ditinjau dari inflasi bulanan, Inflasi Kota Ternate juga dapat ditinjau dari perbandingan harga barang dan jasa pada Bulan Desember tahun 2016 (Inflasi tahun kalender). Inflasi tahun kalender pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2017, Kota Ternate terus mengalami inflasi. Fenomena ini memberikan informasi bahwa Kota Ternate secara rata-rata, harga barang dan jasa tahun 2017 lebih tinggi dibanding harga barang dan jasa tahun 2016. Berdasarkan gambar tersebut, Inflasi kalender tertinggi terjadi pada Bulan Juli 2017 sebesar 3,29 persen. Maknanya adalah rata-rata harga barang dan jasa Bulan Juli 2017 meningkat 3,29 persen dibanding harga barang dan jasa pada Desember 2016.

Gambar 1.3. Perbandingan Laju Inflasi Bulanan Kota Ternate, 2016-2017



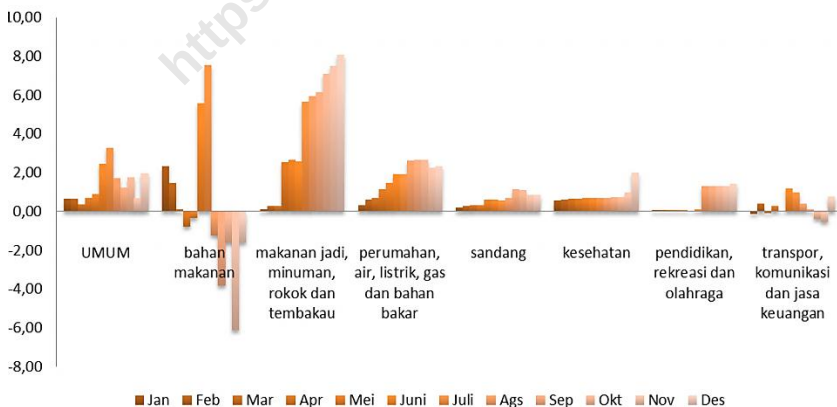
Sumber : BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, secara umum laju inflasi bulanan (bulan berjalan terhadap bulan sebelumnya) tahun 2017 lebih berfluktuatif. Fenomena tersebut terlihat jelas pada Gambar 1.3. dimana grafik inflasi bulanan tahun 2017 memiliki pergerakan lebih dinamis dibanding pergerakan inflasi tahun 2016. Berdasarkan fenomena tersebut

dapat disimpulkan bahwa gejala inflasi di Kota Ternate tahun 2017 lebih kuat dibandingkan kondisi tahun 2016. Dengan kata lain, pemerintah Kota Ternate khususnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) membutuhkan upaya lebih besar untuk menangani inflasi tahun 2017 dibanding penanganan inflasi tahun 2016.

Disamping itu, Inflasi juga dapat diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran yakni, kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga; kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Berikut uraian singkat tentang inflasi menurut kelompok pengeluaran.

Gambar 1.4. Laju Inflasi Kalender menurut Kelompok Pengeluaran Kota Ternate, 2017



Sumber : BPS, diolah

Gambar 1.4. memberikan gambaran umum tentang perubahan harga pada bulan berjalan di tahun 2017 terhadap bulan desember 2016

(inflasi kalender). Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 kenaikan harga barang dan jasa secara umum masih terjadi di Kota Ternate. Bila diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi di tahun 2017 adalah kelompok bahan makanan dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Dengan kata lain, harga barang yang termasuk dalam kelompok bahan makanan dan kelompok transpor di tahun 2017 lebih rendah dibanding harga barang pada kelompok yang sama Bulan Desember 2016. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang lainnya menunjukkan adanya peningkatan laju inflasi setiap bulannya di tahun 2017 jika dibandingkan dengan harga barang dan jasa di Bulan Desember 2016. Dengan kata lain, harga barang dan jasa yang termasuk dalam kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, lebih tinggi dibanding harga pada Bulan Desember 2016.

Selain ditinjau dari Inflasi tahun kalender, Inflasi pada kelompok pengeluaran juga dapat ditinjau dari bulanan, dimana perubahan harga barang dan jasa kelompok pengeluaran bulan berjalan dibanding bulan sebelumnya. Selama tahun 2017, BPS telah merilis angka inflasi bulanan pada setiap awal bulan berikutnya melalui Rilis Berita Resmi Statistik (BRS). Pada buku ini, inflasi bulanan menurut kelompok pengeluaran hanya fokus pada inflasi yang terjadi di penghujung tahun 2017 yakni inflasi bulan Desember 2017. Ulasannya adalah sebagai berikut.

a. Kelompok Bahan Makanan

Kelompok ini pada Bulan Desember 2017 mengalami inflasi sebesar 4,85 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 117,39 pada

November 2017 menjadi 123,08 pada Desember 2017. Kelompok ini memberikan sumbangan/andil inflasi sebesar 0,95 persen pada keseluruhan inflasi Desember 2017. Dari 11 (sebelas) subkelompok ini, terdapat enam subkelompok yang mengalami inflasi, dan lima subkelompok mengalami deflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah ikan segar sebesar 16,12 persen; ikan diawetkan sebesar 10,46 persen; dan buah-buahan sebesar 6,69 persen. Komoditas yang dominan mempengaruhi terjadinya inflasi pada kelompok ini adalah beras, beberapa jenis ikan segar (cakalang, malalugis/sorihi, kembung, selar/tude, bubara), cakalang asap, telur ayam ras, tomat sayur, apel, pisang, salak dan cabai rawit.

b. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada Desember tahun 2017 mengalami inflasi 0,53 persen atau terjadi kenaikan indeks 144,66 pada November 2017 menjadi 145,42 pada Desember 2017 dengan andil sebesar 0,08 persen. Berdasarkan subkelompoknya, perubahan indeks masing-masing subkelompok yaitu makanan jadi sebesar 0,01 persen; minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,30 persen; serta tembakau dan minuman beralkohol sebesar 1,13 persen. Komoditas yang dominan memberikan pengaruh inflasi pada kelompok ini adalah rokok putih dan rokok kretek filter.

c. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada Desember 2017 mengalami inflasi 0,06 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 132,03 pada November 2017 menjadi 132,11 pada Desember 2017 dan memiliki andil sebesar 0,02 persen terhadap inflasi

keseluruhan. Berdasarkan subkelompoknya, perubahan indeks masing-masing subkelompoknya yaitu biaya tempat tinggal sebesar 0,02 persen; bahan bakar, penerangan, dan air sebesar 0,11 persen; perlengkapan rumah tangga sebesar 0,36 persen; serta penyelenggaraan rumah tangga sebesar 0,44 persen. Komoditas yang dominan memberikan pengaruh inflasi kelompok ini adalah semen, bahan bakar rumah tangga, dispenser dan sabun cuci batangan.

d. Sandang

Kelompok sandang pada Desember 2017 mengalami deflasi sebesar 0,01 persen atau mengalami penurunan indeks dari 149,87 pada November 2017 menjadi 149,86 pada Desember 2017 dan memiliki andil sebesar 0,00 persen terhadap inflasi keseluruhan. Berdasarkan subkelompoknya, perubahan masing-masing subkelompok yaitu sandang laki-laki sebesar 0,00 persen; sandang wanita sebesar 0,00 persen; sandang anak-anak sebesar 0,00 persen; serta barang pribadi dan sandang lainnya sebesar -0,04 persen. Komoditas yang dominan berpengaruh terhadap deflasi kelompok ini adalah emas perhiasan.

e. Kesehatan

Kelompok kesehatan pada Desember 2017 mengalami inflasi sebesar 1,05 persen atau terjadi kenaikan indeks 131,64 pada November 2017 menjadi 133,02 pada Desember 2017 dan memiliki andil sebesar 0,04 persen terhadap inflasi keseluruhan. Berdasarkan subkelompoknya, perubahan masing-masing subkelompok yaitu jasa kesehatan sebesar 0,00 persen; obat-obatan sebesar 2,81 persen; jasa perawatan jasmani sebesar 0,00 persen; serta perawatan jasmani dan kosmetik sebesar 0,94

persen. Komoditas yang dominan memberikan pengaruh inflasi pada kelompok ini adalah obat gosok, vitamin, dan obat dengan resep.

f. Pendidikan, Rekreasi dan olahraga

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga pada Desember 2017 mengalami inflasi sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan indeks 130,68 pada November 2017 menjadi 130,85 pada Desember 2017 dan memiliki andil sebesar 0,01 persen terhadap inflasi keseluruhan. Berdasarkan subkelompoknya, perubahan masing-masing subkelompok yaitu, jasa pendidikan sebesar 0,00 persen; kursus/pelatihan sebesar 0,00 persen; perlengkapan/peralatan pendidikan 0,51 persen; rekreasi 0,22 persen; serta olahraga sebesar 0,67 persen. Komoditas yang dominan memberikan pengaruh inflasi adalah pulpen, pensil, tarif rekreasi dan bola sepak.

g. Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Desember 2017 mengalami inflasi 1,32 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 130,15 pada November 2017 menjadi 131,87 pada Desember 2017 dan memiliki andil sebesar 0,19 persen terhadap inflasi keseluruhan. Berdasarkan subkelompoknya, perubahan indeks masing-masing subkelompok yaitu transpor sebesar 1,88 persen; komunikasi dan pengiriman sebesar 0,00 persen; sarana dan penunjang transpor sebesar -0,24 persen; serta jasa keuangan sebesar 0,00 persen. Komoditas yang dominan memberikan pengaruh inflasi pada kelompok ini adalah tarif angkutan udara.

**Tabel 1.1. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Ternate
menurut Kelompok Komoditi Tahun 2017 (2012=100)**

Kelompok/Sub Kelompok Komoditi		Januari		Februari	
		Indeks	Inflasi (persen)	Indeks	Inflasi (persen)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Umum		131,09	0,63	131,13	0,03
I	Bahan Makanan	127,97	2,32	126,88	-0,85
II	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	134,71	0,10	134,94	0,17
III	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	129,50	0,30	129,88	0,29
IV	Sandang	148,89	0,19	149,00	0,07
V	Kesehatan	131,13	0,58	131,16	0,02
VI	Pendidikan, Rekreasi dan OR	129,09	0,06	129,09	0,00
VII	Transportasitasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	130,66	-0,14	131,39	0,56

Lanjutan Tabel

Lanjutan Tabel 1.1.

Kelompok/Sub Kelompok Komoditi		Maret		April	
		Indeks	Inflasi (persen)	Indeks	Inflasi (persen)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Umum		130,72	-0,31	131,19	0,36
I	Bahan Makanan	125,21	-1,32	124,11	-0,88
II	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	134,96	0,01	137,99	2,25
III	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	129,99	0,08	130,59	0,46
IV	Sandang	149,06	0,04	149,08	0,01
V	Kesehatan	131,24	0,06	131,24	0,00
VI	Pendidikan, Rekreasi dan OR	129,10	0,01	129,10	0,00
VII	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	130,73	-0,50	131,18	0,34

Lanjutan Tabel

Lanjutan Tabel 1.1.

Kelompok/Sub Kelompok Komoditi		Mei		Juni	
		Indeks	Inflasi (persen)	Indeks	Inflasi (persen)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Umum		131,45	0,20	133,49	1,55
I	Bahan Makanan	124,64	0,43	132,06	5,95
II	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	138,15	0,12	138,06	-0,07
III	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	130,99	0,31	131,58	0,45
IV	Sandang	149,50	0,28	149,50	0,00
V	Kesehatan	131,29	0,04	131,30	0,01
VI	Pendidikan, Rekreasi dan OR	129,10	0,00	129,03	-0,05
VII	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	130,91	-0,21	132,39	1,13

Lanjutan Tabel

Lanjutan Tabel 1.1.

Kelompok/Sub Kelompok Komoditi		Juli		Agustus	
		Indeks	Inflasi (persen)	Indeks	Inflasi (persen)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Umum		134,56	0,80	132,53	-1,51
I	Bahan Makanan	134,51	1,86	123,55	-8,15
II	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	142,17	2,98	142,56	0,27
III	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	131,58	0,00	132,51	0,71
IV	Sandang	149,47	-0,02	149,62	0,10
V	Kesehatan	131,30	0,00	131,30	0,00
VI	Pendidikan, Rekreasi dan OR	129,16	0,10	130,68	1,18
VII	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	132,11	-0,21	131,37	-0,56

Lanjutan Tabel

Lanjutan Tabel 1.1.

Kelompok/Sub Kelompok Komoditi		September		Oktober	
		Indeks	Inflasi (persen)	Indeks	Inflasi (persen)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Umum		131,86	-0,51	132,55	0,52
I	Bahan Makanan	120,31	-2,62	123,07	2,29
II	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	142,84	0,20	144,09	0,88
III	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	132,56	0,04	132,56	0,00
IV	Sandang	150,30	0,45	150,27	-0,02
V	Kesehatan	131,32	0,02	131,32	0,00
VI	Pendidikan, Rekreasi dan OR	130,68	0,00	130,68	0,00
VII	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	130,98	-0,30	130,37	-0,47

Lanjutan Tabel

Lanjutan Tabel 1.1.

Kelompok/Sub Kelompok Komoditi		November		Desember	
		Indeks	Inflasi (persen)	Indeks	Inflasi (persen)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Umum		131,15	-1,06	132,84	1,29
I	Bahan Makanan	117,39	-4,62	123,08	4,85
II	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	144,66	0,40	145,42	0,53
III	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	132,03	-0,40	132,11	0,06
IV	Sandang	149,87	-0,27	149,86	-0,01
V	Kesehatan	131,64	0,24	133,02	1,05
VI	Pendidikan, Rekreasi dan OR	130,68	0,00	130,85	0,13
VII	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	130,15	-0,17	131,87	1,32

Sumber : BPS, *Berita Resmi Statistik*

Tabel 1.2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Ternate dan Nasional Menurut Bulan Tahun 2017 (2012=100)

Bulan	Kota Ternate		Nasional	
	Indeks	Inflasi (persen)	Indeks	Inflasi (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	131,09	0,63	127,94	0,97
Februari	131,13	0,03	128,24	0,23
Maret	130,72	-0,31	128,22	-0,02
April	131,19	0,36	128,33	0,09
Mei	131,45	0,20	128,83	0,39
Juni	133,49	1,55	129,72	0,69
Juli	134,56	0,80	130,00	0,22
Agustus	132,53	-1,51	129,91	-0,07
September	131,86	-0,51	130,08	0,13
Oktober	132,55	0,52	130,09	0,01
November	131,15	-1,06	130,35	0,20
Desember	132,84	1,29	131,28	0,71

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

Tabel 1.3. Laju Inflasi Kota Ternate dan Nasional menurut Bulan Tahun 2016 – 2017 (2012=100)

Bulan	2016		2017	
	Kota Ternate	Nasional	Kota Ternate	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	0,52	0,51	0,63	0,97
Februari	-0,95	-0,09	0,03	0,23
Maret	0,28	0,19	-0,31	-0,02
April	0,05	-0,45	0,36	0,09
Mei	0,29	0,24	0,20	0,39
Juni	0,30	0,66	1,55	0,69
Juli	1,04	0,69	0,80	0,22
Agustus	-0,10	-0,02	-1,51	-0,07
September	0,09	0,22	-0,51	0,13
Oktober	-0,21	0,14	0,52	0,01
November	0,26	0,47	-1,06	0,20
Desember	0,32	0,42	1,29	0,71

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

BAB 2 PERKEMBANGAN EKONOMI

II. PERKEMBANGAN EKONOMI

Kinerja perekonomian Kota Ternate pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, ini diperlihatkan dengan adanya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 yang mencapai 7,87 triliun rupiah dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 7,08 triliun rupiah.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui bahwa perekonomian Ternate pada tahun 2016 tumbuh sebesar 8,02 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 lebih lambat dimana laju pertumbuhan pada tahun 2015 tercatat sebesar 8,10 persen. Hal ini tak lepas dari pengaruh berbagai faktor yang terjadi di dalam maupun luar wilayah Ternate yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aktivitas produksi baik barang dan jasa di Kota Ternate.

Pada tahun 2016, perekonomian Kota Ternate didominasi oleh tiga sektor utama yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; transportasi dan pergudangan. Kontribusi dari ketiga sektor ini mencapai 58,28 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate atas dasar harga berlaku, dengan kontribusi masing-masing sebesar 25,93 persen; 16,45 persen; serta 16,30 persen. Secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Ternate selama kurun waktu 2010-2016 tidak mengalami perubahan dan masih didominasi oleh ketiga sektor dalam kelompok tersier tersebut.

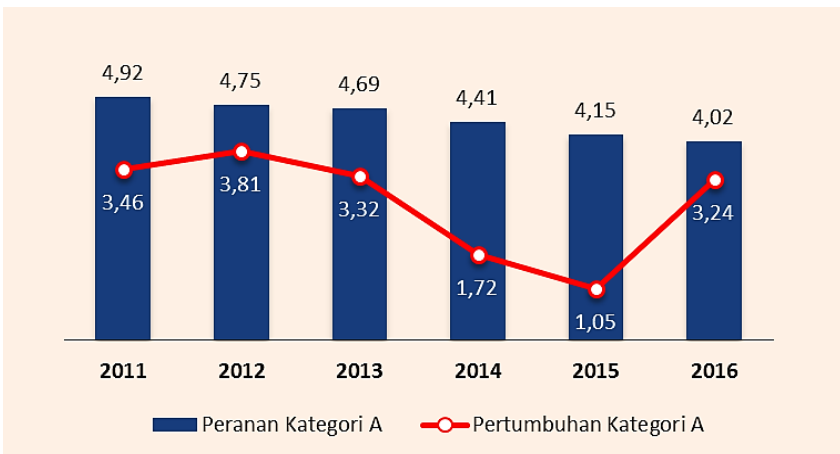
2.1. Perkembangan Ekonomi Sektoral

Mengacu pada BPS, klasifikasi lapangan usaha PDRB terbagi dalam 17 kategori, dimana setiap kategori dirinci lagi menjadi beberapa subkategori. Pengklasifikasian ini merupakan klasifikasi terbaru yang mengacu pada *Social National Account* (SNA) 2008.b

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kategori A)

Selama tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 316,83 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 212,81 miliar rupiah. Bila dilihat dari sisi perkembangan kontribusinya, peran kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan selama enam tahun terakhir, yaitu 4,92 persen pada tahun 2011 menjadi 4,02 persen pada tahun 2016.

Gambar 2.1 Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori A (%), 2011-2016



Laju pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan melambat sejak tahun 2012, yaitu 3,81 persen pada tahun 2012, menjadi 3,32 persen pada periode setelahnya, kemudian turun cukup signifikan menjadi 1,05 persen pada tahun 2015. Perlambatan ini diantaranya disebabkan oleh berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman khususnya di Pulau Ternate dan penurunan produktivitas hasil pertanian. Kemudian pada tahun 2016, laju pertumbuhan kategori ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana tercatat 3,24 persen pada tahun 2016.

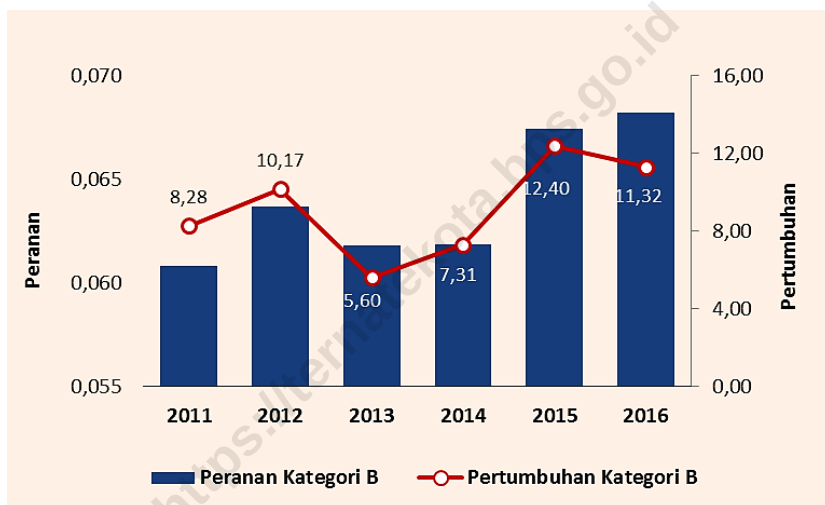
Pertambangan dan Penggalian (Kategori B)

Kegiatan kategori Pertambangan dan Penggalian di Ternate hanya terdiri dari subkategori Penggalian. Pada tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,38 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 3,70 miliar rupiah. Selama kurun waktu 2011-2014 kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Ternate sangat rendah, rata-rata hanya sebesar 0,063 persen. Pada tahun 2015 dan 2016 ada sedikit kenaikan dimana kontribusi kategori ini diatas 0,065 persen.

Laju pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian berfluktuasi. Sejak tahun 2013 terus mengalami peningkatan yaitu dari 5,60 persen pada tahun 2013, menjadi 7,31 persen pada tahun 2014, dan meningkat cukup signifikan pada 2015. Peningkatan nilai tambah yang dihasilkan kategori ini pada tahun 2015 mampu mencatatkan nilai pertumbuhan sebesar 12,40 persen. Kemudian laju pertumbuhan kembali melambat pada tahun 2016 yakni sebesar 11,32 persen. Meskipun laju pertumbuhan kategori ini cukup tinggi, namun tingginya pertumbuhan

tersebut relatif tidak mempengaruhi pembentukan PDRB Kota Ternate karena peranannya terlalu kecil.

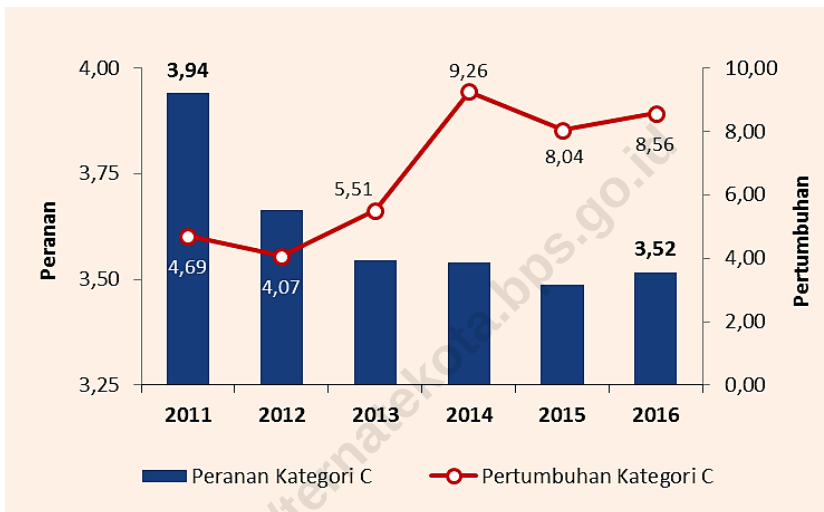
Gambar 2.2. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori B (%), 2011-2016



Industri Pengolahan (Kategori C)

Kategori Industri Pengolahan didominasi oleh industri mikro dan kecil. Pada tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Industri Pengolahan sebesar 276,96 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 213,04 miliar rupiah. Bila dilihat dari sisi perkembangan kontribusinya, peran kategori Industri Pengolahan mengalami penurunan selama enam tahun terakhir, yaitu 3,94 persen pada tahun 2011 menjadi 3,52 persen pada tahun 2016.

Gambar 2.3. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori C (%), 2011-2016



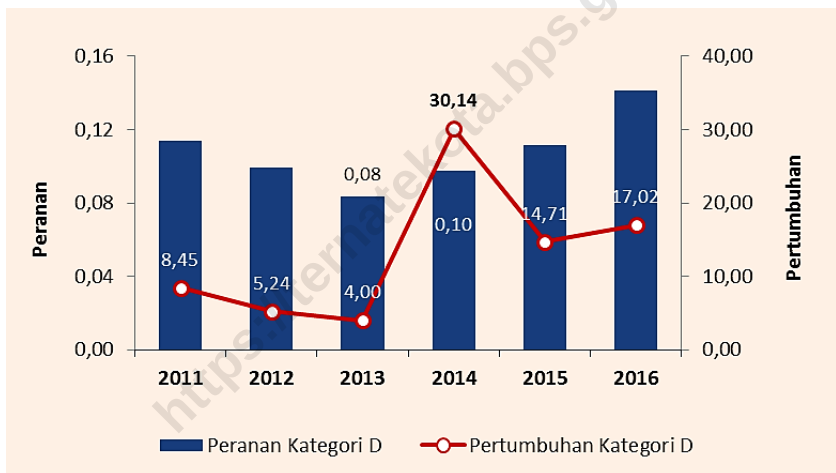
Laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan selama enam tahun terakhir cenderung fluktuatif. Nilai pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2014 yaitu 9,26 persen dan sedikit menurun pada tahun 2015 menjadi 8,05 persen dan kembali naik pada tahun 2016 menjadi 8,56 persen. Meskipun laju pertumbuhan kategori ini terbilang tinggi, namun hal ini memiliki pengaruh relatif kecil untuk meningkatkan peranan kategori ini dikarenakan nilainya yang relatif kecil terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan dimana perannya masih dibawah lima persen.

Pengadaan Listrik dan Gas (Kategori D)

Penyediaan listrik merupakan penunjang dari seluruh kegiatan ekonomi dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas produksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga keberadaannya relatif stabil. Pada tahun 2016 nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang

diciptakan kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,13 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 9,76 miliar rupiah. Selama kurun waktu 2011-2016 kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate rendah, rata-rata hanya sebesar 0,10 persen.

Gambar 2.4. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori D (%), 2011-2016



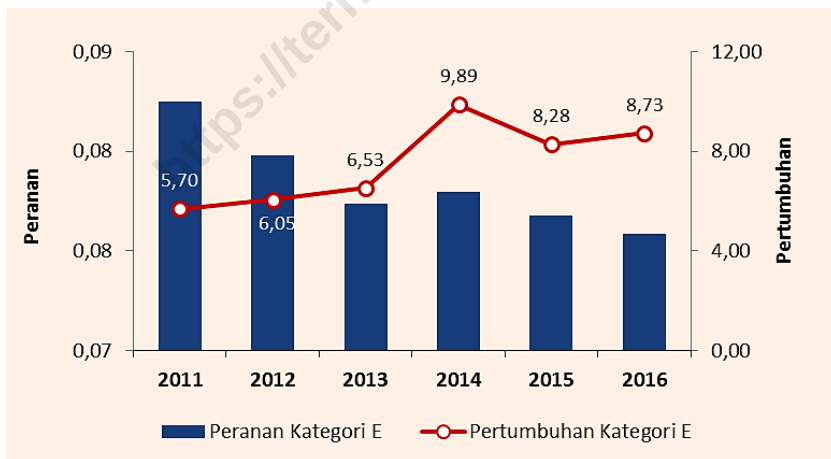
Laju pertumbuhan kategori Pengadaan Listrik dan Gas selama enam tahun terakhir sangat berfluktuatif. Tahun 2011-2013 laju pertumbuhan masih dibawah 10 persen, namun pada tahun 2014 meningkat sangat tinggi hingga mencapai 30,14 persen. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sehingga pada posisi 14,71 persen, dan pada tahun 2016 laju pertumbuhan kategori ini sebesar 17,02 persen. Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi dari tahun 2013 sebesar 4 persen menjadi 30,14 persen di tahun 2014, namun peningkatan tersebut hanya mampu meningkatkan peran kategori D sebesar 0,08 persen pada tahun 2013 menjadi 0,10 persen pada tahun 2014.

2014. Kemudian mulai tahun 2015 sampai 2016, laju pertumbuhan dan peranan kategori D sama-sama mengalami peningkatan.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E)

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Gambar 2.5. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori E (%), 2011-2016



Pada tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,98 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 4,78 miliar rupiah. Selama kurun waktu 2011-2016

kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate rendah, rata-rata hanya sebesar 0,08 persen.

Laju pertumbuhan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami peningkatan dari 5,70 persen pada tahun 2011 menjadi 9,89 persen pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 sedikit melambat menjadi 8,28 persen dan kembali naik menjadi 8,73 persen di tahun 2016. Nilai pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut pada tahun 2014 sampai 2016, nyatanya belum dapat meningkatkan peranan kategori ini secara signifikan.

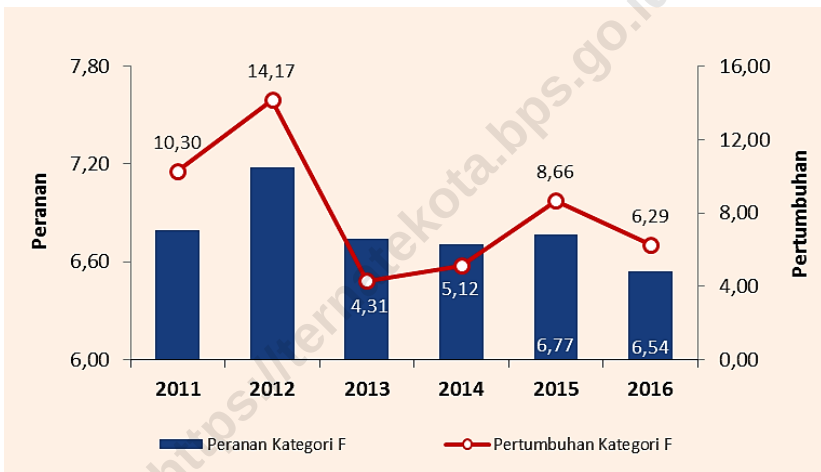
Konstruksi (Kategori F)

Pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta menyebabkan kategori Konstruksi mampu tumbuh sebesar 6,29 persen pada tahun 2016 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 8,66 persen. Bila dilihat kontribusi kategori Konstruksi terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate, pada tahun 2016 kategori ini mencatatkan kontribusinya sebesar 6,54 persen dengan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang sebesar 515,23 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 390,56 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan kontribusi dimana kontribusi tahun sebelumnya sebesar 6,77 persen.

Pada Gambar 2.6 memberikan gambaran bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada nilai peranan/kontribusi maupun laju pertumbuhan kategori ini. Terlihat bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 perubahan nilai peranan/kontribusi dan laju pertumbuhannya berjalan beriringan. Ketika

terjadi kenaikan laju pertumbuhan, maka besaran peranan juga ikut meningkat. Sebaliknya, jika laju pertumbuhan mengalami penurunan, maka kontribusi kategori ini juga mengalami penurunan.

Gambar 2.6. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori F (%), 2011-2016



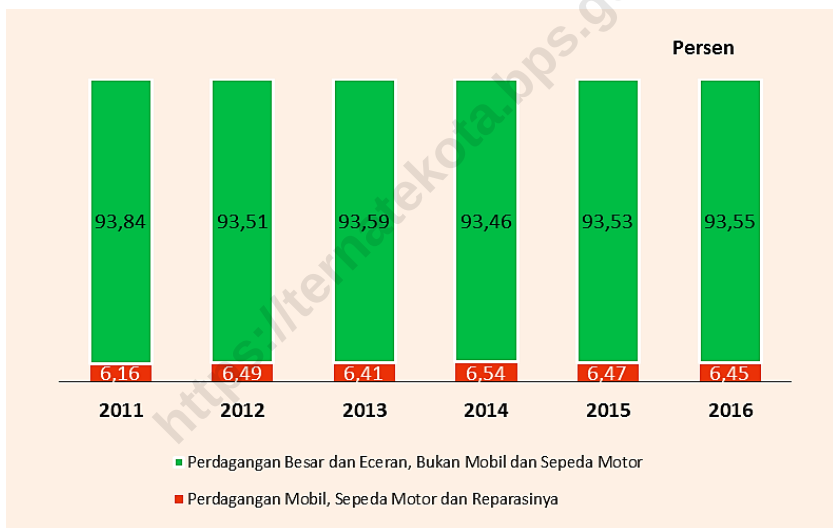
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G)

Kategori ini mencakup subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan subkategori Perdagangan Besar dan Eceran. Kategori ini merupakan kategori terbesar pertama penyumbang perekonomian di Kota Ternate. Tercatat kontribusi kategori ini pada tahun 2016 adalah sebesar 25,93 persen.

Besarnya peranan PDRB kategori lapangan usaha perdagangan selama periode tahun 2011-2016, didominasi oleh sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, yang

menyumbang rata-rata 93,58 persen per tahun terhadap pembentukan nilai tambah bruto kategori G. Sedangkan sisanya sebesar 6,42 persen merupakan peranan sub kategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Gambar 2.7. Peranan Subkategori G (%), 2011-2016

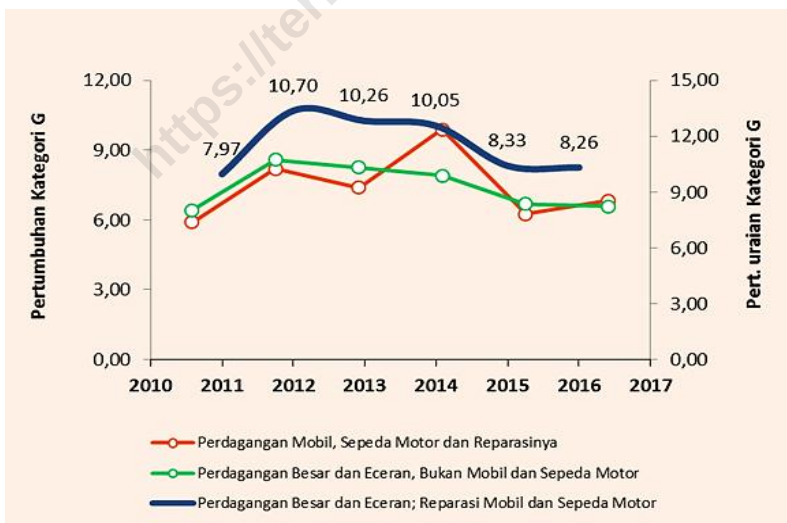


Laju pertumbuhan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sejak tahun 2012 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2012 kategori ini tumbuh sebesar 10,70 persen dan terus melambat hingga di tahun 2016 menjadi 8,26 persen. Meskipun kategori ini mengalami perlambatan laju pertumbuhan selama lima tahun terakhir, namun kategori ini masih menunjukkan eksistensinya dalam menyumbang perekonomian Kota Ternate. Kategori ini pada tahun 2012 mencatatkan nilai kontribusinya terhadap perekonomian Kota Ternate sebesar 24,30 persen, sedangkan

pada tahun 2016 kategori ini mampu mencatatkan kontribusinya sebesar 25,93 persen.

Pada Gambar 2.8 juga memberikan informasi bahwa laju pertumbuhan sub kategori perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor secara umum lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan sub kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2011-2013 dan 2015, laju pertumbuhan sub kategori perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan sub kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Kategori dan Subkategori G (%), 2011-2016

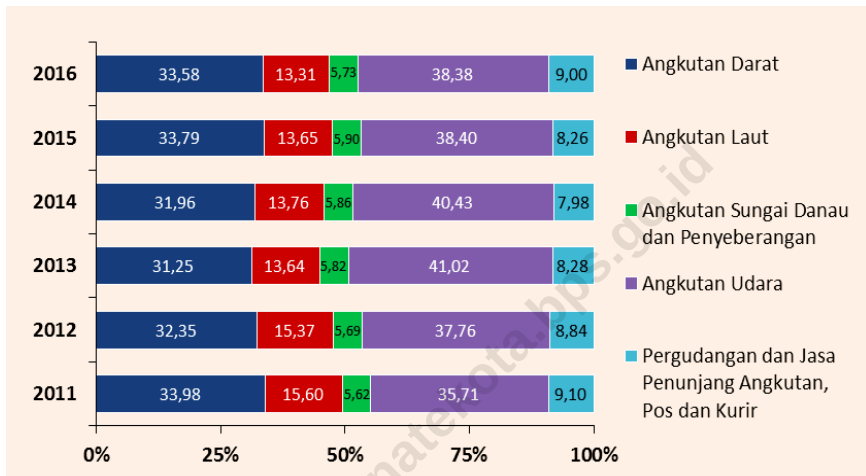


Transportasi dan Pergudangan (Kategori H)

Tingginya arus mobilisasi baik manusia maupun barang di Kota Ternate menyebabkan kategori Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 9,25 persen pada tahun 2016 atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 7,88 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan kategori ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan Kota Ternate merupakan pintu gerbang utama untuk masuk ke Provinsi Maluku Utara. Hal ini juga menyebabkan kategori Transportasi dan Pergudangan menjadi salah satu kategori penyumbang nilai tambah terbesar ketiga terhadap perekonomian Kota Ternate. Bila dilihat kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate, pada tahun 2016 kategori ini mencatatkan kontribusinya sebesar 16,30 persen dengan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang sebesar 1.284,32 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 877,99 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kategori transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan kontribusi dimana kontribusi tahun sebelumnya sebesar 16,15 persen.

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari enam sub kategori, yaitu sub kategori Angkutan Rel, sub kategori Angkutan Darat, sub kategori Angkutan Laut, sub kategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, sub kategori Angkutan Udara, serta sub kategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Semua sub kategori terdapat di Kota Ternate, kecuali sub kategori Angkutan Rel.

Gambar 2.9. Peranan Subkategori H (%), 2011-2016

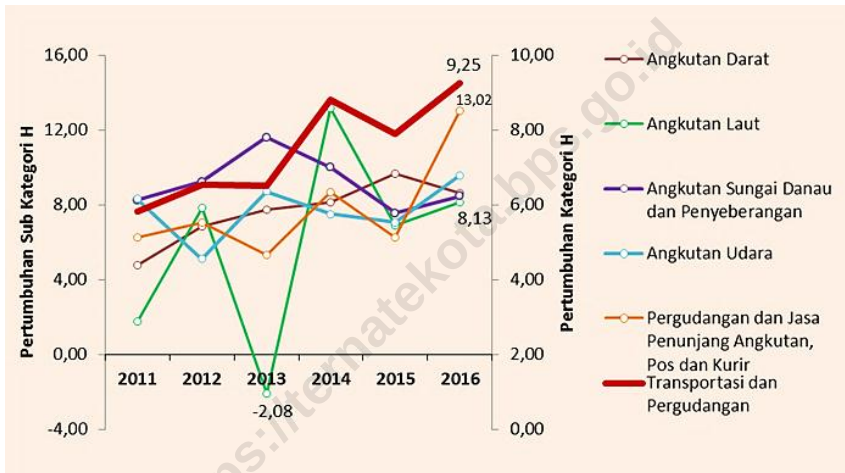


Bila dirinci per subkategori, Angkutan Udara memberikan kontribusi terbesar terhadap kategori Transportasi dan Pergudangan, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 38,38 persen pada tahun 2016. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah Angkutan Darat sebesar 33,58 persen dan Angkutan Laut sebesar 13,31 persen.

Bila dilihat berdasarkan sub kategori, hampir semua sub kategori mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Sub kategori angkutan laut merupakan sub kategori yang paling berfluktuatif di Kota Ternate. Sementara sub kategori yang pertumbuhannya konsisten dan cenderung naik adalah sub kategori angkutan darat. Pada tahun 2016, sub kategori pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 13,02 persen. Sementara, sub

kategori angkutan laut merupakan sub kategori dengan laju pertumbuhan terendah yakni sebesar 8,13 persen.

Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Subkategori H (%), 2011-2016



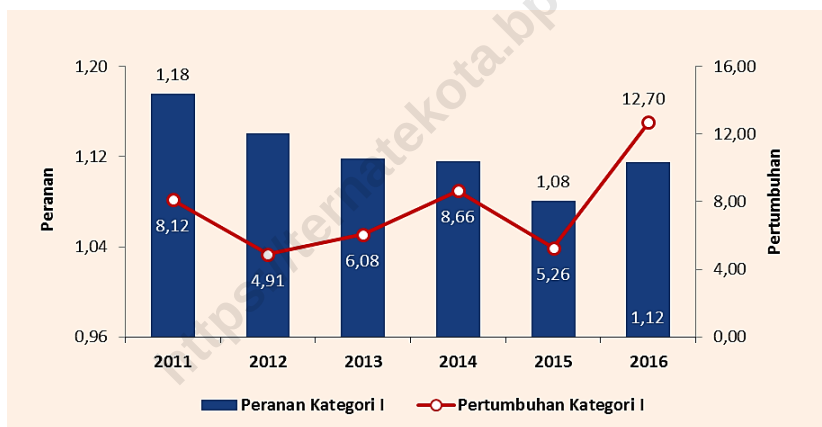
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I)

Pada tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 87,86 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 65,36 miliar rupiah. Bila dilihat dari sisi perkembangan kontribusinya, peran kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum cenderung mengalami penurunan selama tahun 2011 sampai 2015, yaitu 1,18 persen pada tahun 2011 menjadi 1,08 persen pada tahun 2015. Kemudian, kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 1,12 persen.

Laju pertumbuhan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum selama tahun 2011 sampai 2015 cenderung berfluktuatif di bawah

sembilan persen. Kemudian, pada tahun 2016 laju pertumbuhan meningkat tajam menjadi 12,70 persen. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya aktivitas pemerintahan menggunakan fasilitas perhotelan di tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan laju pertumbuhan di tahun 2016 juga memicu peningkatan kontribusi kategori ini terhadap pembentukan nilai tambah bruto Kota Ternate.

Gambar 2.11. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori I (%), 2011-2016



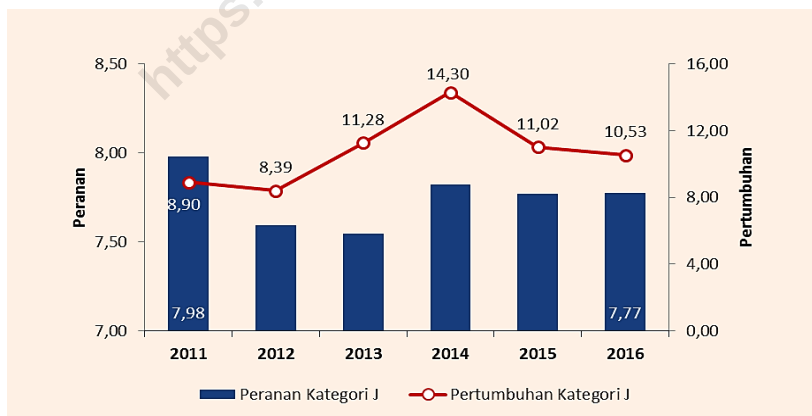
Informasi dan Komunikasi (Kategori J)

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan penting sebagai penunjang kegiatan di setiap aktivitas ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Pada tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 612,29 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 547,35 miliar rupiah. Bila dilihat dari sisi perkembangan kontribusinya, peran kategori Informasi dan Komunikasi

relatif mengalami fluktuasi selama enam tahun terakhir, yaitu 7,98 persen pada tahun 2011 menjadi 7,77 persen pada tahun 2016. Jika diamati, sejak tahun 2011 sampai 2013 kontribusi kategori ini mengalami penurunan. Kemudian kembali naik pada tahun 2014 dan kembali turun secara perlahan sampai tahun 2016.

Meskipun kontribusi relatif tidak stabil, namun laju pertumbuhan kategori ini menunjukkan kondisi lebih baik. Laju pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi meningkat sejak tahun 2011 sebesar 8,90 persen menjadi 14,30 persen pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2016, kategori ini menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan yakni sebesar 11,02 persen pada tahun 2015 dan 10,53 persen pada tahun 2016.

Gambar 2.12. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori J (%), 2011-2016

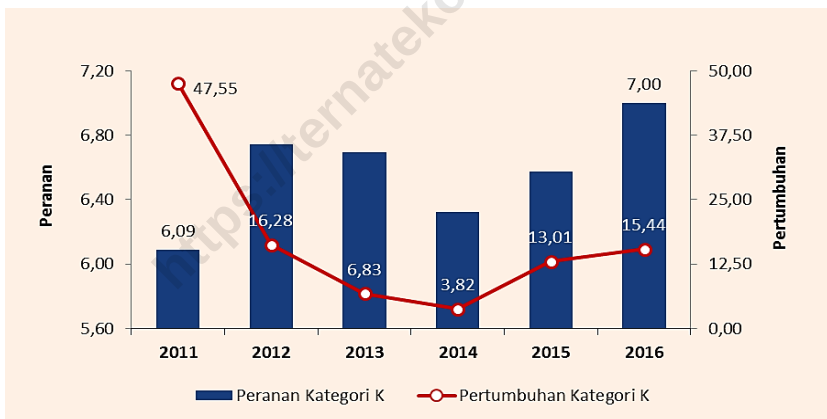


Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K)

Pada tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 551,56

miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 400,09 miliar rupiah. Bila dilihat dari sisi perkembangan kontribusinya, peran kategori Jasa Keuangan dan Asuransi berada di kisaran 6 persen dan kurang dari 7 persen. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, kategori ini juga mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Kontribusi kategori ini mengalami 2 (dua) kali tren naik selama enam tahun terakhir yakni pada periode 2011-2012 dan periode 2014-2016. Selain itu, kategori ini juga mengalami tren menurun selama periode 2012-2014.

Gambar 2.13. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori K (%), 2011-2016



Tidak hanya kontribusi yang mengalami naik turun, melainkan juga laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi selama kurun waktu enam tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada periode 2011-2014, laju pertumbuhan mengalami perlambatan sangat drastis yakni dari 47,55 persen menjadi 3,82 persen. Pada periode tersebut, perekonomian nasional yang tidak stabil menyebabkan perlambatan di kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Ternate. Selanjutnya, pada periode 2014-2016

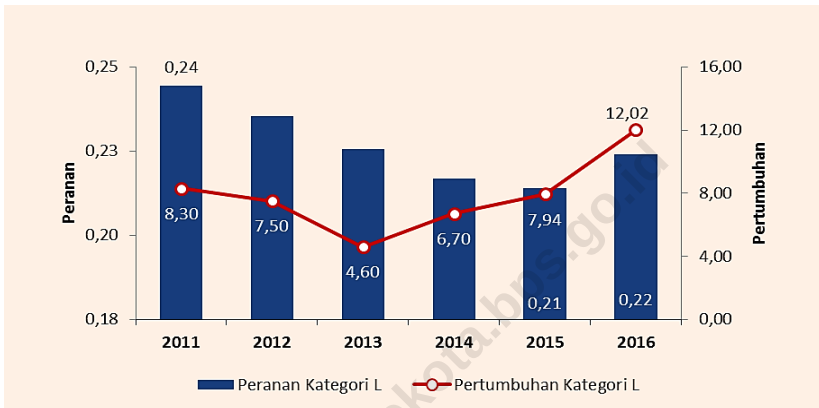
perekonomian kembali stabil dan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan kategori ini di Kota Ternate. Tercatat pada tahun 2014 laju pertumbuhan kategori K sebesar 3,82 persen menjadi 15,44 persen di tahun 2016.

Real Estate (Kategori L)

Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk di Kota Ternate semakin meningkat. Secara tidak langsung peningkatan ini menyebabkan peningkatan kebutuhan dasar penduduk, salah satunya adalah papan (rumah). Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan rumah (real estate) di Kota Ternate. Selama tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Real Estate sebesar 17,65 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 13,85 miliar rupiah. Nilai tambah yang diciptakan oleh kategori ini hanya menyumbang kurang dari 1 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate.

Bila dilihat dari sisi perkembangan kontribusinya, kontribusi kategori Real Estat mengalami penurunan selama periode 2011-2015, yaitu 0,24 persen pada tahun 2011 menjadi 0,21 persen pada tahun 2015. Kemudian kembali naik menjadi 0,22 persen pada tahun 2016. Bila ditinjau dari laju pertumbuhannya, selama enam tahun terakhir kategori ini memiliki laju pertumbuhan cukup baik dimana angka terendah yang pernah dicapai sebesar 4,60 persen pada tahun 2013 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2016 sebesar 12,02 persen. Jika dilihat trennya, pada periode 2011-2013, kategori ini mengalami tren menurun, dan pada periode 2013-2016 mengalami tren naik.

Gambar 2.14. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori L (%), 2011-2016



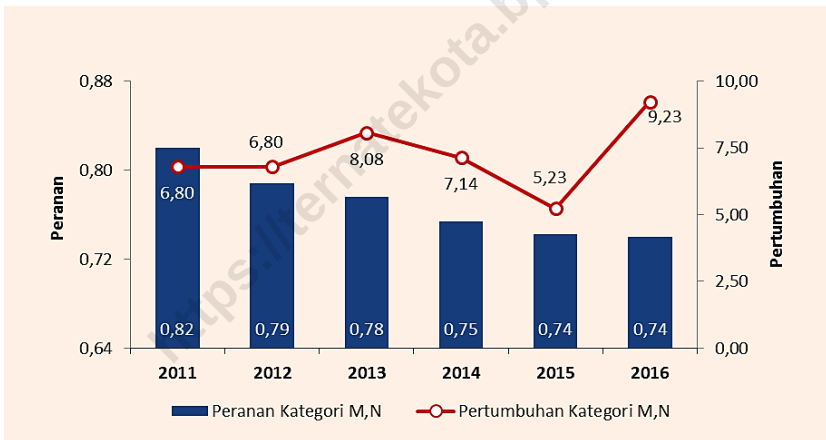
Jasa Perusahaan (Kategori M,N)

Kategori Jasa Perusahaan memiliki cakupan kegiatan yang luas dan beragam. Kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik; dan kegiatan jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, agen penunjang perjalanan dan penunjang usaha lainnya dicakup dalam kategori ini. Pada tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Jasa Perusahaan sebesar 58,32 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 46,18 miliar rupiah. Sejak tahun 2011 sampai 2016, kategori ini hanya menyumbang terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate kurang dari 1 persen saja.

Bila dilihat dari sisi perkembangan kontribusinya, peran kategori Jasa Perusahaan relatif mengalami penurunan selama enam tahun terakhir, yaitu 0,82 persen pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,74 persen pada tahun 2016. Sementara,

grafik laju pertumbuhannya menunjukkan adanya tren naik dan turun selama enam tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2011, laju pertumbuhan kategori ini sebesar 6,80 persen, kemudian meningkat hingga tahun 2013 sebesar 8,08 persen. Kemudian kembali turun hingga mencapai 5,23 persen di tahun 2015, dan kembali naik menjadi 9,23 persen pada tahun 2016.

Gambar 2.15. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori M,N (%), 2011-2016



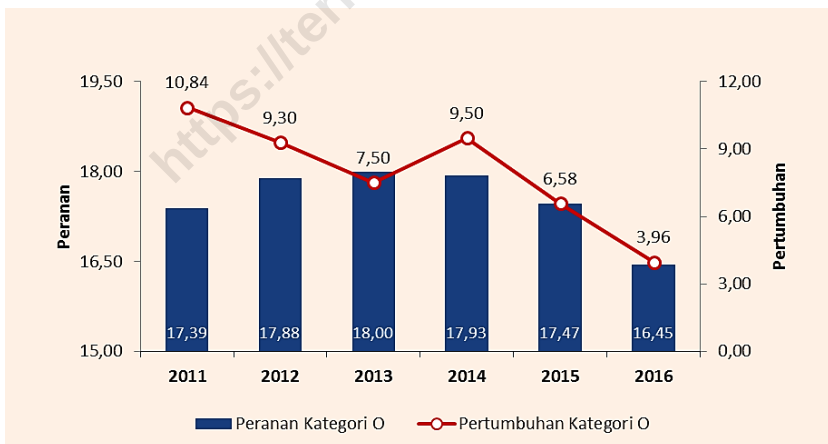
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O)

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Kategori ini merupakan penopang perekonomian kedua di Ternate setelah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranannya dalam

pembentukan PDRB Kota Ternate tahun 2016 tercatat sebesar 16,45 persen.

Pada tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1.295,95 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 928,91 miliar rupiah. Gambar 4.16 menunjukkan bahwa selama tahun 2011 sampai 2016, peranan kategori ini mengalami naik turun. Pada tahun 2011 kategori ini memiliki peranan sebesar 17,39 persen, kemudian meningkat menjadi 18,00 persen pada tahun 2013 dan kembali turun menjadi 16,45 persen pada tahun 2016.

Gambar 2.16. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori O (%), 2011-2016



Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan, kategori ini mengalami perlambatan laju pertumbuhan sejak tahun 2011 sampai 2016. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan kategori ini sebesar 10,84 persen, kemudian melambat menjadi 7,50 persen pada tahun 2013. Setelah itu, pada tahun 2014 laju pertumbuhannya kembali meningkat

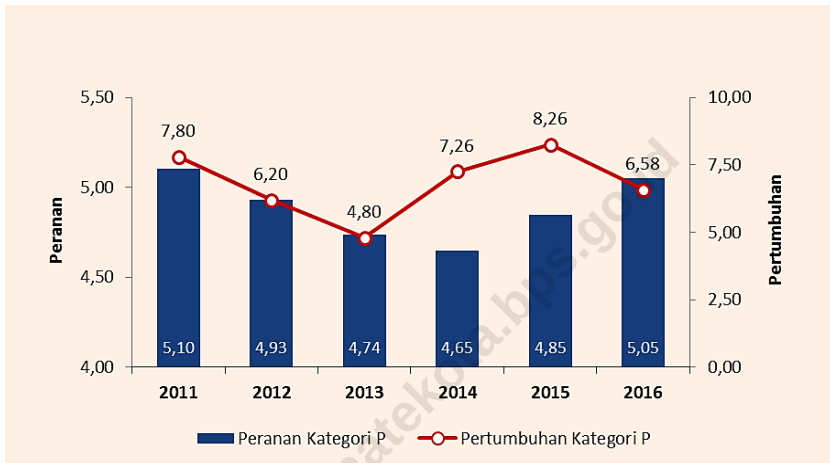
menjadi 9,50 persen. Kemudian laju pertumbuhan kembali melambat hingga mencapai posisi 3,96 persen pada tahun 2016.

Jasa Pendidikan (Kategori P)

Aktivitas perekonomian pada kegiatan jasa pendidikan tercermin dari nilai PDRB kategori Jasa Pendidikan. Pada tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Jasa Pendidikan sebesar 397,68 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 275,96 miliar rupiah. Secara rata-rata selama tahun 2011-2016, kategori Jasa Pendidikan menyumbang sebesar 4,89 persen terhadap total perekonomian Kota Ternate.

Bila dilihat laju pertumbuhannya, kategori ini juga mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuatif sama seperti halnya kategori-kategori sebelumnya. Pada tahun 2011, kategori ini mampu tumbuh sebesar 7,80 persen, namun terjadi perlambatan hingga tahun 2013 dengan laju pertumbuhan menjadi 4,80 persen. Kemudian, kategori ini mampu bangkit kembali sehingga laju pertumbuhannya meningkat hingga menjadi 8,26 persen pada tahun 2015. Sementara, pada tahun 2016 kembali melambat menjadi 6,58 persen. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, kategori ini memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,81 persen per tahunnya.

Gambar 2.17. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori P (%), 2011-2016



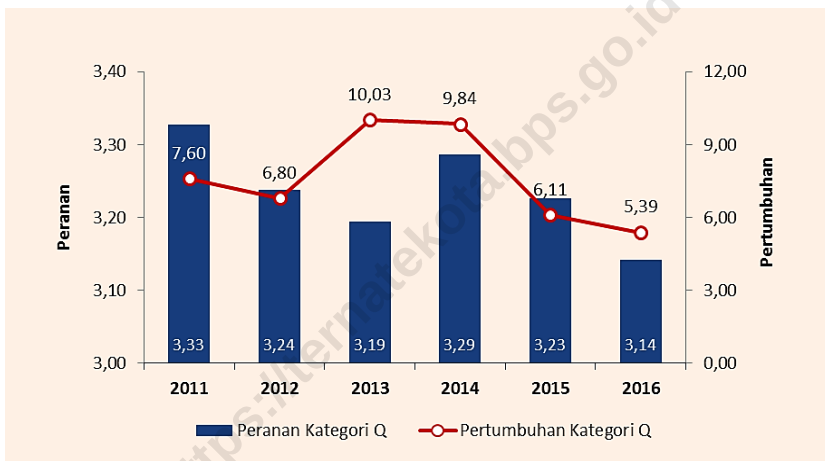
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q)

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2015, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 247,48 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 187,75 miliar rupiah.

Berdasarkan Gambar 4.18 menunjukkan bahwa perkembangan peranan dan laju pertumbuhan kategori ini cukup dinamis. Secara rata-rata selama tahun 2011-2016, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menyumbang sebesar 3,24 persen terhadap total perekonomian Kota Ternate. Bila dilihat laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan pada periode 2012-2013. Sedangkan pada periode 2013-2016, kategori ini mengalami perlambatan sehingga menyebabkan laju pertumbuhan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial sebesar 5,39 persen di tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan kategori ini adalah 7,62 persen per tahun selama periode tahun 2011-2016.

Gambar 2.18. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Q (%), 2011-2016



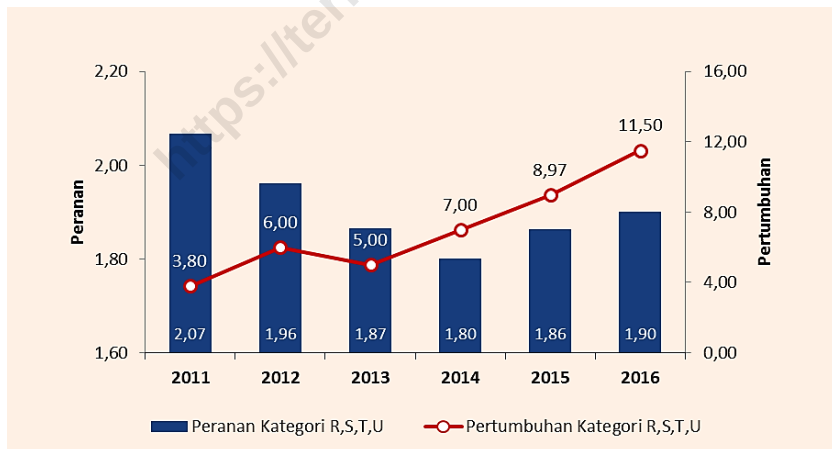
Jasa lainnya (Kategori R,S,T,U)

Selama tahun 2016, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang diciptakan kategori Jasa Lainnya sebesar 149,65 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 119,21 miliar rupiah. Kategori Jasa Lainnya memiliki sumbangan terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate sebesar 1,90 persen pada tahun 2016. Bila dilihat dari sisi perkembangan kontribusinya, peran kategori Jasa Lainnya mengalami penurunan pada periode 2011-2014 dan kembali naik pada periode 2014-2016. Selama enam tahun terakhir, kategori Jasa Lainnya menjadi penyumbang tertinggi pada yakni sebesar 2,07 persen pada tahun 2011.

Sementara, pada tahun 2014 kategori ini memiliki sumbangan terendah yakni sebesar 1,80 persen.

Bila ditinjau dari laju pertumbuhannya, Gambar 4.19 menunjukkan bahwa kategori ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan setiap tahunnya. Tahun 2011 mencatat laju pertumbuhan kategori ini sebesar 3,80 persen. Pada tahun 2016, laju pertumbuhannya menjadi 11,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kategori Jasa Lainnya merupakan salah satu kategori lapangan usaha yang dapat berkembang dengan baik di Kota Ternate.

Gambar 2.19. Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori R,S,T,U (%) Tahun 2011-2016



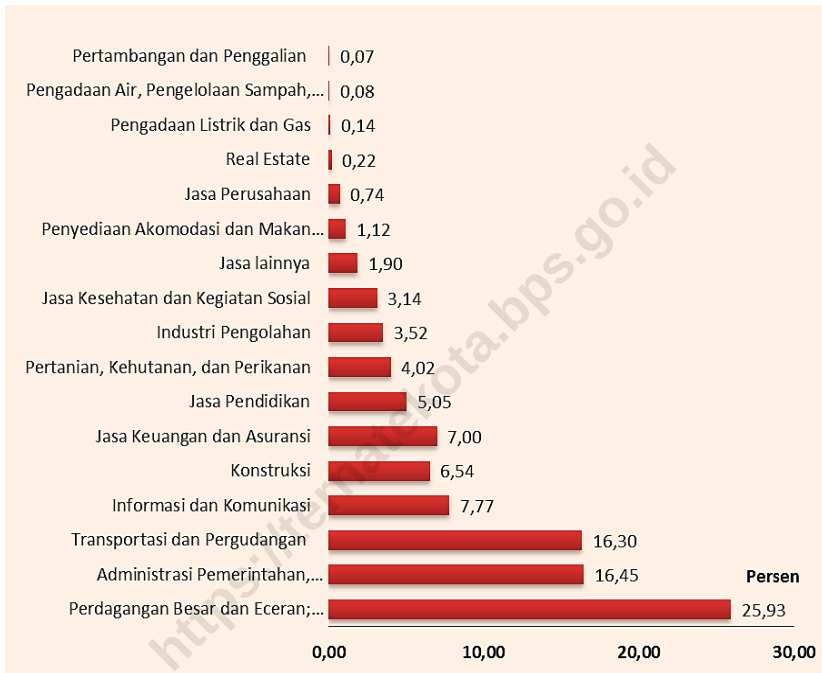
2.2. Peranan Sektor Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Indikator ini merupakan informasi penting untuk mengetahui kategori lapangan usaha yang merupakan penopang utama perekonomian di suatu wilayah. Penyajian indikator struktur ekonomi dari waktu ke waktu dapat menunjukkan ada tidaknya perubahan struktur perekonomian di suatu wilayah.

Secara umum perekonomian Kota Ternate masih didominasi oleh tiga kategori yaitu 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan 3) Transportasi dan Pergudangan selama enam tahun terakhir. Secara keseluruhan, ketiga kategori tersebut memiliki peranan atau kontribusi terhadap perekonomian Kota Ternate lebih dari 50 persen. Ketiga kategori tersebut memiliki total kontribusi sebesar 58,68 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate Tahun 2016.

Jika diuraikan per kategori, sebanyak 25,93 persen nilai tambah dari aktivitas perekonomian di Ternate tahun 2016 diciptakan oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi kategori ini meningkat sebesar 1,33 poin jika dibandingkan dengan kontribusi Kategori G pada tahun 2011. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan besar dan eceran serta reparasi terus meningkat dan berkontribusi terhadap perekonomian Kota Ternate dari tahun 2011 sampai tahun 2016.

Gambar 2.2. Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (%), 2016



Kategori yang berperan dalam perekonomian Kota Ternate berikutnya adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,45 persen dan kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,30 persen. Sebaliknya kategori Pertambangan dan Penggalian merupakan kategori yang memberikan kontribusi terkecil dalam perekonomian Kota Ternate dengan peranan sebesar 0,07 persen.

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Ternate menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2011-2016

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	202,95	226,05	254,26	276,16	293,97	316,83
B	Pertambangan dan Penggalian	2,51	3,03	3,35	3,87	4,77	5,38
C	Industri Pengolahan	162,67	174,29	192,15	221,68	246,93	276,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,70	4,74	4,54	6,12	7,89	11,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,41	3,80	4,19	4,88	5,44	5,98
F	Konstruksi	280,61	341,62	365,60	420,13	478,96	515,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.015,74	1.155,97	1.340,33	1.564,20	1.798,74	2.042,86
H	Transportasi dan Pergudangan	631,20	730,34	862,97	1.015,70	1.143,44	1.284,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	48,55	54,27	60,61	69,87	76,51	87,86
J	Informasi dan Komunikasi	329,47	361,30	409,07	489,78	550,04	612,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	251,34	320,90	363,02	396,09	465,31	551,56
L	Real Estate	10,09	11,20	12,23	13,58	15,16	17,65
M,N	Jasa Perusahaan	33,86	37,52	42,09	47,22	52,56	58,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	718,17	850,79	975,51	1.122,68	1.236,54	1.295,95
P	Jasa Pendidikan	210,75	234,63	256,70	291,05	343,18	397,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,40	154,04	173,19	205,78	228,42	247,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	85,36	93,28	101,10	112,73	131,87	149,65
Produk Domestik Regional Bruto		4.128,79	4.757,77	5.420,94	6.261,53	7.079,72	7.877,13

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Ternate menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2011-2016

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	186,98	194,11	200,55	204,01	206,14	212,81
B	Pertambangan dan Penggalan	2,37	2,61	2,75	2,96	3,32	3,70
C	Industri Pengolahan	151,40	157,56	166,25	181,64	196,25	213,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,11	5,37	5,59	7,27	8,34	9,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,27	3,47	3,70	4,06	4,40	4,78
F	Konstruksi	270,16	308,43	321,71	338,18	367,46	390,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	945,86	1.047,07	1.154,50	1.270,50	1.376,32	1.489,96
H	Transportasi dan Pergudangan	603,41	642,86	684,68	744,92	803,63	877,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45,57	47,80	50,71	55,10	58,00	65,36
J	Informasi dan Komunikasi	323,53	350,68	390,23	446,05	495,19	547,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	237,80	276,51	295,39	306,68	346,57	400,09
L	Real Estate	9,55	10,26	10,74	11,46	12,37	13,85
M,N	Jasa Perusahaan	32,48	34,69	37,50	40,18	42,28	46,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	651,60	712,17	765,58	838,31	893,50	928,91
P	Jasa Pendidikan	200,35	212,77	222,98	239,17	258,92	275,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130,08	138,92	152,86	167,90	178,15	187,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	82,39	87,33	91,70	98,12	106,92	119,21
Produk Domestik Regional Bruto		3.881,91	4.232,64	4.557,42	4.956,48	5.357,75	5.787,27

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Ternate menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2016

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,92	4,75	4,69	4,41	4,15	4,02
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
C	Industri Pengolahan	3,94	3,66	3,54	3,54	3,49	3,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,08	0,10	0,11	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	6,80	7,18	6,74	6,71	6,77	6,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,60	24,30	24,73	24,98	25,41	25,93
H	Transportasi dan Pergudangan	15,29	15,35	15,92	16,22	16,15	16,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,14	1,12	1,12	1,08	1,12
J	Informasi dan Komunikasi	7,98	7,59	7,55	7,82	7,77	7,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,09	6,74	6,70	6,33	6,57	7,00
L	Real Estate	0,24	0,24	0,23	0,22	0,21	0,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,82	0,79	0,78	0,75	0,74	0,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,39	17,88	18,00	17,93	17,47	16,45
P	Jasa Pendidikan	5,10	4,93	4,74	4,65	4,85	5,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,33	3,24	3,19	3,29	3,23	3,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,07	1,96	1,87	1,80	1,86	1,90
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Ternate menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2016

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,46	3,81	3,32	1,72	1,05	3,24
B	Pertambangan dan Penggalian	8,28	10,17	5,60	7,31	12,40	11,32
C	Industri Pengolahan	4,69	4,07	5,51	9,26	8,04	8,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,45	5,24	4,00	30,14	14,71	17,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,70	6,05	6,53	9,89	8,28	8,73
F	Konstruksi	10,30	14,17	4,31	5,12	8,66	6,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,97	10,70	10,26	10,05	8,33	8,26
H	Transportasi dan Pergudangan	5,81	6,54	6,51	8,80	7,88	9,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,12	4,91	6,08	8,66	5,26	12,70
J	Informasi dan Komunikasi	8,90	8,39	11,28	14,30	11,02	10,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	47,55	16,28	6,83	3,82	13,01	15,44
L	Real Estate	8,30	7,50	4,60	6,70	7,94	12,02
M,N	Jasa Perusahaan	6,80	6,80	8,08	7,14	5,23	9,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,84	9,30	7,50	9,50	6,58	3,96
P	Jasa Pendidikan	7,80	6,20	4,80	7,26	8,26	6,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,60	6,80	10,03	9,84	6,11	5,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,80	6,00	5,00	7,00	8,97	11,50
Produk Domestik Regional Bruto		9,65	9,04	7,67	8,76	8,10	8,02

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

BAB 3

PEMBANGUNAN MANUSIA

III. PEMBANGUNAN MANUSIA

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang” (Human Development Report 1990).

Pernyataan yang disampaikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada *Human Development Report* (HDR) menyatakan dengan jelas arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia dimana menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

3.1. Konsep Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia berbeda dengan konsep pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep lebih luas dan lebih komprehensif serta mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada berbagai tahapan pembangunan.

Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan bagi masyarakat (*a process of enlarging the choices of people*). Dari berbagai pilihan masyarakat, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu berumur

panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Pembangunan manusia mensyaratkan adanya kebebasan. Seperti disebutkan di atas, tujuan pembangunan manusia adalah untuk memperbanyak pilihan-pilihan, untuk mencapainya tidak mungkin tanpa adanya kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan menjalani kehidupan.

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama :

1. **Produktivitas.** Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
2. **Ekuitas.** Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan itu.
3. **Kesinambungan.** Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang.
4. **Pemberdayaan.** Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dimana masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Perlu ditekankan bahwa dalam setiap laporan pembangunan manusia baik tingkat global, tingkat nasional maupun tingkat daerah menekankan pesan pembangunan yang berpusat pada manusia dimana menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan.

3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990. Indeks ini digunakan untuk mengukur pembangunan manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Secara rutin, IPM dipublikasikan dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

3.2.1. Makna IPM

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari aspek dasar kualitas hidup yang terdiri dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Sebelum UNDP memperkenalkan IPM pada tahun 1990, banyak berbagai metode/alat ukur untuk mengukur capaian pembangunan manusia. Aspek yang digunakan untuk pengukuran juga sangat beragam. Morris D. Morris (1979) mengembangkan *Physical Quality Life Index* (PQLI) atau yang dikenal luas dengan Indeks Mutu Hidup (IMH). Di Indonesia sejak dekade 1980-an telah dikenal beberapa indikator semacam ini seperti Indeks Mutu Hidup (IMH), Indeks Kualitas Manusia Indonesia (IKMI), dan lain-lain.

Pada tingkat internasional, IPM dipakai sebagai tolok ukur kemajuan yang telah dicapai oleh suatu negara setelah dibandingkan dengan negara-negara lain. Selanjutnya, IPM pada tingkat nasional dipergunakan sebagai tolok ukur antar provinsi dan IPM di tingkat provinsi dipakai sebagai perbandingan antar kabupaten/kota.

Secara konseptual, IPM adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.

Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa IPM sebagai alat ukur capaian pembangunan di suatu tempat pada suatu waktu. Walaupun tidak dapat mengungkapkan semua dimensi pembangunan, IPM dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat berhasil tidaknya suatu kebijakan pembangunan.

3.2.2. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat capaian pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun hidup manusia yang berkualitas.
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah (negara, provinsi, kabupaten/kota).
- IPM dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh wilayah di Indonesia.

3.3. Dimensi/Komponen Pembangunan Manusia

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Ada banyak dukungan terhadap dimensi/komponen IPM, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator tersebut. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010.

Penyempurnaan dan perubahan tersebut berdampak pada perubahan dimensi/komponen penyusun IPM. Dengan demikian, pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM menggunakan komponen penyusun IPM terbaru dan dihitung menggunakan metode baru.



Sumber: BPS, Publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2014

3.3.1 Dimensi Kesehatan

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang dan sehat. Secara teori, seseorang dapat bertahan hidup lebih lama apabila dia sehat dan bilamana menderita sakit masyarakat perlu



Dimensi Kesehatan

mengatur untuk membantu mempercepat kesembuhannya sehingga dia dapat bertahan hidup lebih lama (datang ke fasilitas/petugas kesehatan). Oleh karena itu, proksi umur panjang dan sehat digunakan dalam mengukur pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator ini menjadi salah satu indikator dari dimensi kesehatan.

Menurut BPS, Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Di Indonesia, BPS menghitung angka harapan hidup (AHH) berdasarkan hasil SP2010 dan proyeksinya.

Secara matematis, AHH akan membentuk indeks pada dimensi kesehatan dimana dalam penyusunan indeks mensyaratkan standarisasi. Indeks pada masing-masing dimensi, tak terkecuali dimensi kesehatan harus distandardisasi menggunakan metode *min-max*. Tujuan dari standarisasi ini adalah agar hasil penghitungan dapat dikomparasikan antarwilayah. Mengacu pada UNDP, Angka harapan

hidup yang dihitung BPS memiliki nilai minimum dan maksimum secara berurutan, yakni 25 tahun dan 85 tahun. Dengan demikian, formula yang digunakan untuk menghitung indeks pada dimensi kesehatan adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimana:

- $I_{kesehatan}$ = Indeks dimensi kesehatan
- AHH = Angka Harapan Hidup suatu wilayah
- $AHH_{\max}$ = AHH maksimum yakni 85 tahun
- $AHH_{\min}$ = AHH minimum yakni 25 tahun

3.3.2 Dimensi Pengetahuan (Pendidikan)

Harkat dan martabat manusia akan meningkat apabila yang bersangkutan memiliki kecerdasan. Tingkat kecerdasan (*intelligence*) seseorang pada titik waktu tertentu merupakan produk gabungan dari keturunan (*heredity*), pendidikan dan pengalamannya.

Prestasi pembangunan masyarakat akan diukur dengan melihat seberapa jauh masyarakat di kawasan tersebut telah memanfaatkan

sumberdayanya untuk memberikan fasilitas kepada warganya agar menjadi lebih cerdas. Hidup sehat dan cerdas diyakini akan meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang, sedangkan hidup



Dimensi Pendidikan

yang panjang dalam keadaan tetap sehat dan cerdas juga akan memperpanjang masa produktif tersebut sehingga pada gilirannya akan meningkatkan mutu peran warga tersebut sebagai pelaku (*agent*) pembangunan.

Kaitannya dengan IPM metode baru, terdapat dua indikator penyusun dimensi pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling-MYS*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling-EYS*). Indikator harapan lama sekolah (HLS) merupakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator ini menggantikan indikator sebelumnya, yaitu angka melek huruf (AMH). Berdasarkan kajian UNDP, AMH sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena AMH di seluruh wilayah di Indonesia sudah merata tingginya, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Menurut BPS, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini diasumsikan bahwa rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun pada kondisi normal.

Cakupan penduduk yang digunakan untuk menghitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi proses pendidikan sudah berakhir pada usia tersebut. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas mengacu pada standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Dalam penghitungan, RLS dihitung dengan cara tidak langsung. Langkah pertama adalah memberikan bobot variabel “pendidikan yang ditamatkan/jenjang pendidikan” menggunakan data hasil Susenas.

Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$RLS = \frac{\sum_{i=1} f_i \cdot S_i}{\sum_{i=1} f_i}$$

Dimana :

RLS = rata-rata lama sekolah

f_i = frekuensi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan

S_i = skor masing-masing pendidikan i , dan

i = jenjang pendidikan ($i = 1, 2, \dots, 7$)

Agar terbandingkan secara internasional, Indikator RLS juga dilakukan standardisasi. Metode standardisasi yang digunakan yakni metode *min-max*. Nilai minimum dan nilai maksimum mengacu pada rekomendasi UNDP secara berturut-turut yaitu 0 tahun dan 15 tahun. Sehingga Indeks RLS dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

Sebenarnya UNDP merekomendasikan untuk keperluan ini agar digunakan penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, untuk kondisi saat ini, populasi usia 15 tahun ke atas sangat tepat karena dari berbagai komitmen internasional pembangunan pendidikan lebih terfokus pada pencapaian pendidikan dasar untuk anak usia 7–15 tahun yang semestinya masih sekolah.

Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jenjang Pendidikan	Tahun Konversi
Tdk pernah sekolah	0
Tamat SD	6
Tamat SLTP	9
Tamat SLTA/SMU	12
Diploma I	13
Diploma II	14
Akademi/Diploma III	15
Diploma IV/Sarjana	16
Master S2	18
Doktor (S3)	21

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Menurut BPS, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan pada sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Dalam penghitungannya, BPS menghitung HLS pada usia 7 tahun ke atas. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yakni program wajib belajar. Sumber data yang digunakan adalah data hasil Susenas. Sementara itu, untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pondok pesantren. Sumber data penduduk di pondok pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana

- HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
 E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
 P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t
 i = Usia ($a, a+1, \dots, n$)
 FK = Faktor koreksi pesentren

Agar terbandingkan, Indikator HLS juga dilakukan standardisasi. Metode standardisasi yang digunakan adalah metode *min-max*. Nilai minimum dan nilai maksimum HLS mengacu pada rekomendasi UNDP secara berturut-turut yaitu 0 tahun dan 18 tahun. Sehingga Indeks HLS dapat dihitung dengan formula berikut.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

Setelah dihitung Indeks RLS dan Indeks HLS, kemudian kedua indeks tersebut digabungkan untuk menghitung indeks dimensi pendidikan. Formula penghitungan indeks pada dimensi pendidikan adalah sebagai berikut.

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

3.3.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak merupakan salah satu dimensi dasar pada pembangunan manusia yang digunakan untuk melihat kemampuan seseorang dalam memenuhi kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi ini pada metode baru, UNDP menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sementara, BPS menggunakan indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. BPS mengasumsikan bahwa pengeluaran sama dengan pendapatan.



Dimensi Standar Hidup Layak

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul dan dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita tersebut dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 (2012=100).

Sementara itu, penghitungan paritas daya beli (*purchasing power parity-PPP*) pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan komoditas makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan menggunakan metode Rao.

Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan yang dihitung oleh BPS memiliki ukuran standardisasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Metode standardisasi menggunakan metode *min-max* dimana batas minimum dan maksimum menyesuaikan kondisi di Indonesia. BPS menggunakan batas minimum sebesar 1.007.436 rupiah dimana nilai ini merupakan garis kemiskinan terendah level kabupaten

tahun 2010 (data empiris) yakni Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Sementara, batas maksimum adalah proyeksi pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan 2025 (akhir RPJPN). Sehingga batas maksimum adalah sebesar 26.572.352 rupiah.

Setelah itu, ukuran yang digunakan untuk mengukur dimensi standar hidup layak adalah Indeks pengeluaran per kapita disesuaikan. Indeks tersebut dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Setelah semua dimensi dihitung indeksnya, kemudian menghitung indeks kompositnya. Indeks komposit ini merupakan indeks gabungan dari seluruh indeks. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya merupakan indeks komposit dimana indeks tersebut dihitung dengan cara menggabungkan indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Pada penghitungan IPM metode baru, indeks komposit IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik. Berikut rumusan penghitungan indeks komposit (IPM).

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \cdot I_{\text{pendidikan}} \cdot I_{\text{pengeluaran}}}$$

Dimana:

$I_{\text{kesehatan}}$	=	Indeks dimensi kesehatan
$I_{\text{pendidikan}}$	=	Indeks dimensi pendidikan
$I_{\text{pengeluaran}}$	=	Indeks dimensi standar hidup layak

3.4 Mengukur Kecepatan IPM

Pada metode baru, untuk mengetahui kecepatan IPM dalam mencapai nilai maksimal tidak lagi menggunakan reduksi *Shortfall*, melainkan menggunakan ukuran pertumbuhan IPM secara aritmetik. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan menunjukkan bahwa semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Pertumbuhan IPM dapat dihitung menggunakan formula berikut.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Dimana :

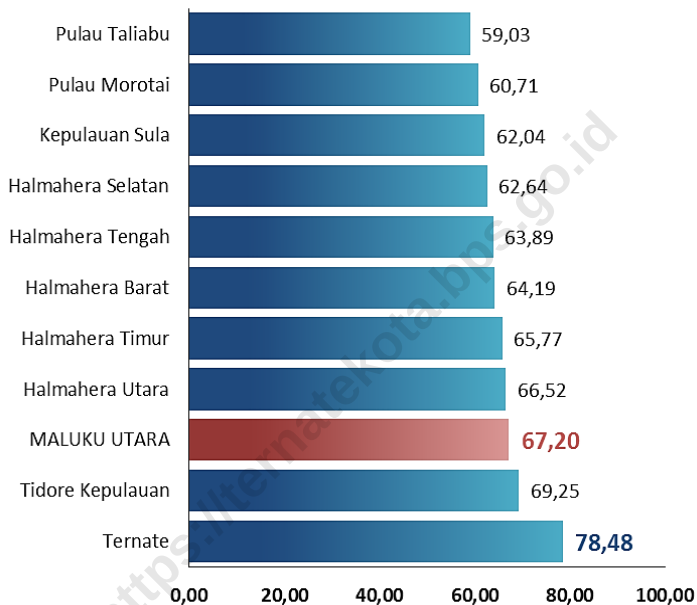
IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

3.5. Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Ternate

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia Kota ternate telah mencapai 78,48 pada tahun 2017. Dengan capaian IPM itu, Kota Ternate berada pada posisi status pembangunan manusia kategori "tinggi". Selain itu, capaian IPM Kota Ternate menduduki peringkat pertama dalam pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten/kota se-Maluku Utara. Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, capaian IPM Kota Ternate lebih tinggi 11,28 poin dibanding IPM level Provinsi Maluku Utara.

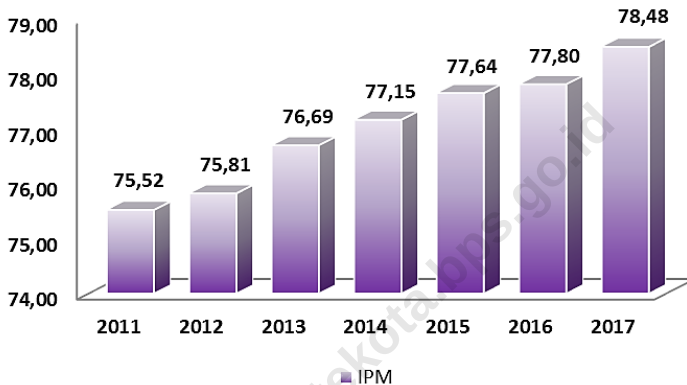
Gambar 3.1 Perbandingan IPM Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara, 2017



Sumber : BPS, diolah

Capaian IPM Kota Ternate dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik mencatat capaian IPM Kota Ternate dari tahun 2011 sampai 2017 sebesar 75,52 (tahun 2011) menjadi 78,48 (tahun 2017). Kenaikan IPM tersebut terlihat pada gambar berikut (Gambar 3.2)

Gambar 3.2. Perkembangan IPM Kota Ternate, 2010-2016



Sumber : BPS, diolah

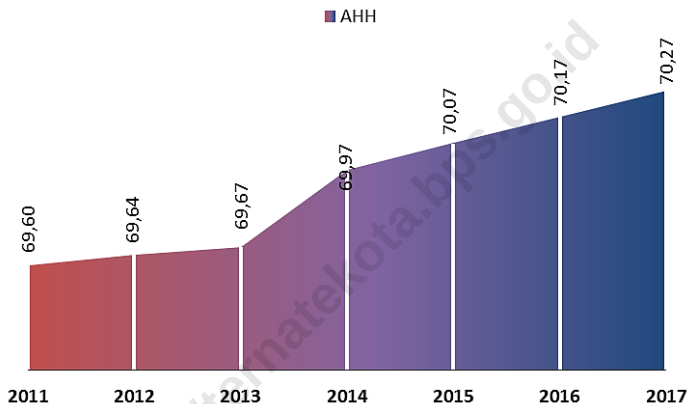
3.4.1 Angka Harapan Hidup

Dalam berbagai analisis demografi angka harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting. Angka harapan hidup adalah umur rata-rata yang akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Indikator ini biasanya menjadi satu bagian yang saling mendukung secara berbanding terbalik dengan angka kematian bayi (IMR). IMR merupakan angka peluang atau probabilitas seorang bayi meninggal sebelum mencapai tepat umur satu tahun.

Pada tingkat makro angka harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Peningkatan angka harapan hidup memberikan indikasi kompleks di berbagai bidang secara lintas sektor. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi

sosial ekonomi penduduk dalam satu periode berakibat penurunan angka harapan hidup.

Gambar 3.3. Angka Harapan Hidup Kota Ternate (tahun), 2011-2017



Sumber : BPS, diolah

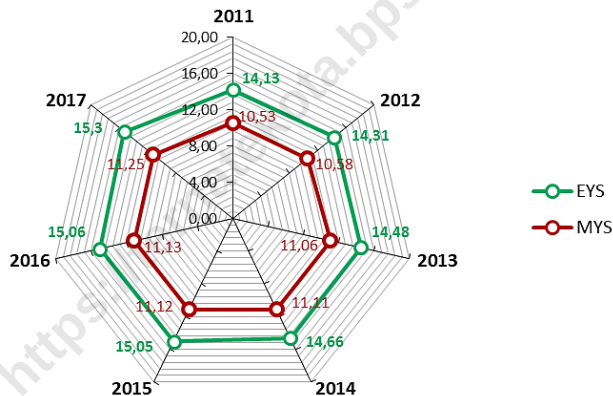
Selama kurun waktu 2011 hingga 2017, angka harapan hidup Kota Ternate terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Saat ini, angka harapan hidup saat lahir di Kota Ternate telah mencapai 70,27 tahun. Angka ini dapat dimaknai bahwa seorang bayi yang baru lahir pada tahun 2017 memiliki peluang hidup sampai usia 70,27 tahun.

Peningkatan ini tentunya mencerminkan semakin baiknya kualitas dan standar hidup masyarakat Kota Ternate. Angka harapan hidup Kota Ternate merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah Maluku Utara, bahkan lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Maluku Utara.

3.4.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Manusia yang berpendidikan akan memiliki peluang yang besar untuk menjadi manusia yang berkualitas. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas manusia memiliki pilihan-pilihan lainnya.

Gambar 3.4. Perkembangan EYS dan MYS Kota Ternate (tahun), 2011-2017



Sumber : BPS, diolah

Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Sampai dengan tahun 2017, rata-rata lama sekolah Kota Ternate mencapai 11,25 tahun. Angka ini dimaknai bahwa penduduk Kota Ternate yang berusia 25 tahun mengenyam pendidikan rata-rata selama 11,25 tahun atau setara dengan kelas XI. Sementara, harapan lama sekolah Kota ternate pada tahun 2017 telah mencapai 15,30 tahun. Angka ini

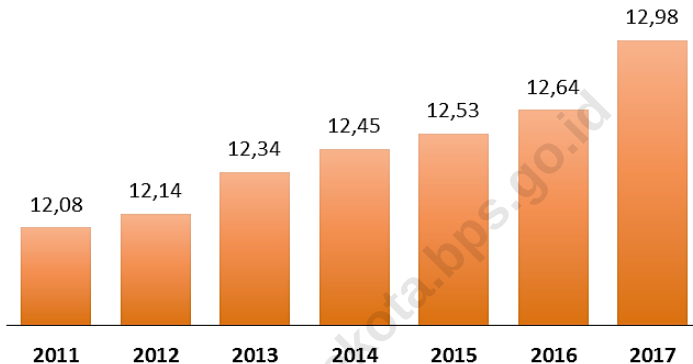
dapat dimaknai bahwa anak yang berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 15,30 tahun atau mencapai Diploma III (DIII). Selama empat tahun terakhir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat. Rata-rata lama sekolah tumbuh 1,55 persen per tahun, sementara harapan lama sekolah tumbuh 1,51 persen per tahun.

3.4.3 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan, seperti yang telah terjadi pada era tahun 70-an. Akan tetapi uang memiliki arti penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Pengeluaran per kapita juga dapat dimaknai dengan tingkat daya beli. Semakin besar nilai pengeluaran per kapita, maka dapat dikatakan tingkat daya beli seseorang semakin tinggi. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti.

Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita penduduk Kota Ternate telah mencapai 12,98 juta rupiah per tahun. Pengeluaran per kapita Kota Ternate terus meningkat selama tujuh tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,93 persen per tahun dimana ditunjukkan pada Gambar 3.5. Selama kurun waktu tersebut, peningkatan pengeluaran per kapita (tingkat daya beli) semakin tinggi, namun pengingkatannya cukup bervariasi. Peningkatan daya beli masyarakat pada periode 2011-2017 paling tinggi terjadi pada tahun 2017, yakni meningkat sebesar 2,69 persen.

Gambar 3.5. Pengeluaran per Kapita Kota Ternate (juta Rp), 2011-2017



Sumber : BPS, diolah

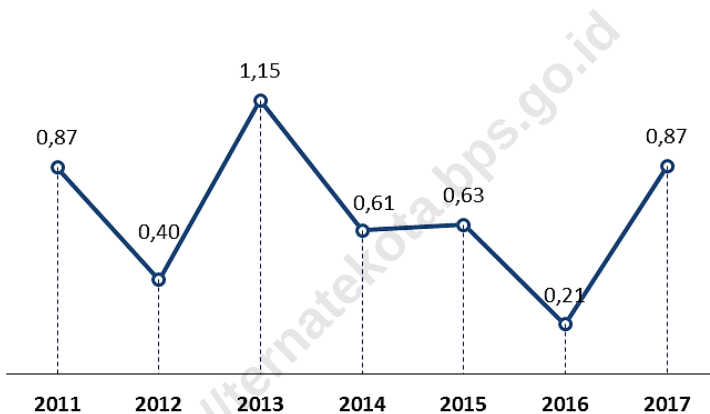
3.4.4 Kecepatan IPM

Pada penghitungan metode baru, ukuran untuk melihat kecepatan IPM mencapai nilai maksimal adalah dengan melihat laju pertumbuhan IPM. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan IPM sangat berfluktuatif. Kecepatan tumbuh IPM Kota Ternate paling besar terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 1,15 persen. Sementara, kecepatan tumbuh IPM paling lambat terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 0,21 persen. Pada tahun 2017, IPM Kota Ternate mampu tumbuh sebesar 0,87 persen. Artinya, IPM Kota Ternate tahun 2017 meningkat 0,87 persen terhadap IPM Kota Ternate tahun 2016.

Selain itu, Gambar 3.6 juga memberikan informasi bahwa terjadinya krisis global yang dampaknya sampai di Kota Ternate juga

memberikan efek melambatnya kecepatan tumbuh IPM Kota Ternate. Fenomena ini terjadi sejak tahun 2013 hingga 2016.

Gambar 3.6. Pertumbuhan IPM Kota Ternate, 2011-2017



Sumber : BPS, diolah

Tabel 3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017

Kode	Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8200	MALUKU UTARA	65,91	66,63	67,20
8201	Halmahera Barat	62,97	63,83	64,19
8202	Halmahera Tengah	62,07	63,05	63,89
8203	Kepulauan Sula	60,50	61,25	62,04
8204	Halmahera Selatan	61,26	62,17	62,64
8205	Halmahera Utara	65,04	66,02	66,52
8206	Halmahera Timur	63,99	64,92	65,77
8207	Pulau Morotai	59,27	59,87	60,71
8208	Pulau Taliabu	58,26	58,66	59,03
8271	Kota Ternate	77,64	77,80	78,48
8272	Kota Tidore Kepulauan	67,45	68,37	69,25

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Tabel 3.2. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017 (Tahun)

Kode	Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8200	MALUKU UTARA	67,44	67,51	67,54
8201	Halmahera Barat	65,35	65,45	65,55
8202	Halmahera Tengah	62,40	62,60	62,80
8203	Kepulauan Sula	62,39	62,50	62,60
8204	Halmahera Selatan	65,03	65,11	65,20
8205	Halmahera Utara	68,77	68,86	68,94
8206	Halmahera Timur	67,49	67,67	67,85
8207	Pulau Morotai	65,98	66,13	66,28
8208	Pulau Taliabu	61,08	61,20	61,32
8271	Kota Ternate	70,07	70,17	70,27
8272	Kota Tidore Kepulauan	68,43	68,54	68,64

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Tabel 3.3. Harapan Lama Sekolah Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017 (Tahun)

Kode	Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8200	MALUKU UTARA	13,10	13,45	13,56
8201	Halmahera Barat	12,61	13,05	13,06
8202	Halmahera Tengah	12,29	12,70	12,92
8203	Kepulauan Sula	11,83	12,23	12,38
8204	Halmahera Selatan	11,91	12,31	12,52
8205	Halmahera Utara	12,69	13,06	13,22
8206	Halmahera Timur	12,09	12,48	12,72
8207	Pulau Morotai	11,59	11,92	12,17
8208	Pulau Taliabu	11,48	11,73	11,87
8271	Kota Ternate	15,05	15,06	15,30
8272	Kota Tidore Kepulauan	13,27	13,74	13,90

Sumber : *BPS Provinsi Maluku Utara*

Tabel 3.4. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017 (Tahun)

Kode	Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8200	MALUKU UTARA	8,37	8,52	8,61
8201	Halmahera Barat	7,77	7,86	7,87
8202	Halmahera Tengah	7,85	8,14	8,37
8203	Kepulauan Sula	7,95	7,96	8,33
8204	Halmahera Selatan	7,15	7,42	7,43
8205	Halmahera Utara	8,06	8,35	8,36
8206	Halmahera Timur	7,57	7,77	7,89
8207	Pulau Morotai	6,84	6,88	6,89
8208	Pulau Taliabu	7,41	7,42	7,43
8271	Kota Ternate	11,12	11,13	11,25
8272	Kota Tidore Kepulauan	8,91	9,11	9,39

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Tabel 3.5. Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Kota Ternate dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017 (Ribu Rupiah)

Kode	Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8200	MALUKU UTARA	7.423	7.545	7.792
8201	Halmahera Barat	6.889	7.076	7.266
8202	Halmahera Tengah	7.359	7.481	7.688
8203	Kepulauan Sula	6.545	6.741	6.859
8204	Halmahera Selatan	6.791	6.894	7.026
8205	Halmahera Utara	6.957	7.110	7.302
8206	Halmahera Timur	7.410	7.560	7.841
8207	Pulau Morotai	5.809	5.888	6.167
8208	Pulau Taliabu	6.158	6.208	6.306
8271	Kota Ternate	12.529	12.643	12.989
8272	Kota Tidore Kepulauan	7.631	7.772	8.044

Sumber : *BPS Provinsi Maluku Utara*

BAB 4

SEKTOR PERBANKAN

IV. PERBANKAN

Pada tahun 2017, kinerja perbankan di Kota Ternate mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Penurunan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator utama seperti: perkembangan total asset dan kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat/pihak ketiga (DPK).

Penurunan di sektor perbankan ini sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate yang mengalami perlambatan selama kurun waktu dua tahun terakhir. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya nilai posisi dana pihak ketiga dan menurunnya laju pertumbuhan asset bank di Kota Ternate.

4.1. Perkembangan Asset Bank Umum

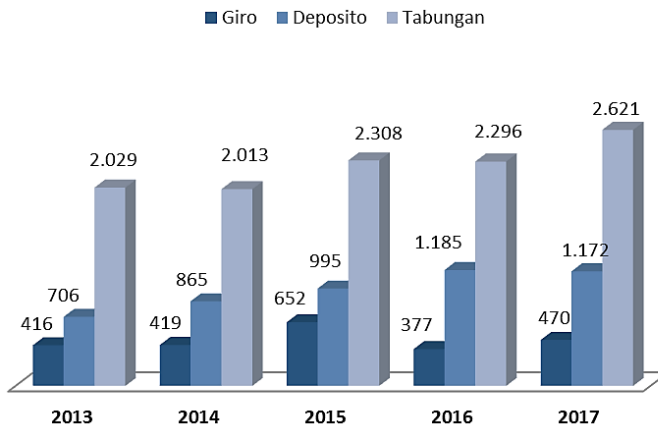
Total aset perbankan yang meliputi bank umum dan bank perkreditan rakyat di Kota Ternate pada tahun 2017 mencapai Rp 6,85 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 16,46 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 5,88 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,77 persen. Pada tahun 2017, bank pemerintah masih memegang peranan dominan dalam penguasaan asset keseluruhan perbankan yang ada di Kota Ternate. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah Maluku Utara, total asset perbankan di Kota Ternate mendominasi sebesar 68,38 persen.

4.2. Penghimpunan Dana Bank Umum dan BPR

Penghimpunan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh Bank Umum dan BPR di Kota Ternate menunjukkan penurunan. Adapun DPK yang dihimpun antara lain giro, tabungan, dan simpanan berjangka (deposito).

Menurut Bank Indonesia, giro didefinisikan sebagai simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) milik pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan, tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Deposito adalah simpanan yang penarikannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Gambar 4.1. Posisi Simpanan Masyarakat (Rupiah dan Valas) menurut Jenis Simpanan pada Bank Umum dan BPR di Kota Ternate, 2013-2017 (Milyar rupiah)



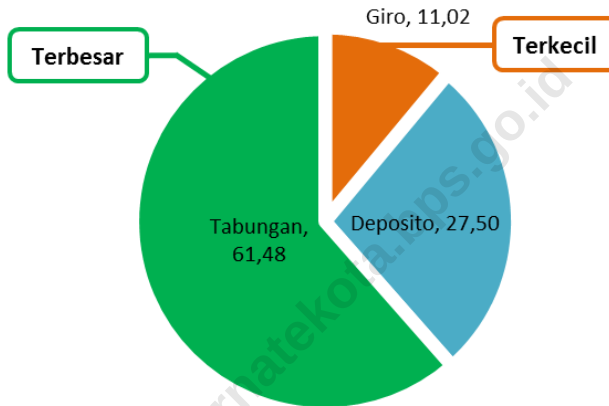
Sumber : Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, diolah

Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan di Kota Ternate selama tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 10,49 persen yaitu dari Rp 3,86 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi Rp 4,26 triliun rupiah pada tahun 2017. Dari tiga komponen dana milik masyarakat yang dikelola oleh perbankan, ada dua komponen yang meningkat yakni Giro dan Tabungan. Sementara, komponen Simpanan Berjangka mengalami penurunan.

Bila dirinci berdasarkan komponennya, komponen Giro mengalami peningkatan dari 376,8 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 470,3 miliar rupiah pada tahun 2017 atau meningkat sekitar 24,81 persen. Komponen Tabungan juga mengalami peningkatan dari 2.296,4 miliar rupiah tahun 2016 menjadi 2.621,1 miliar rupiah tahun 2017 atau meningkat sebesar 14,13 persen. Sementara itu, komponen tabungan berjangka (deposito) mengalami penurunan dari 1.185,4 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 1.172,3 miliar rupiah sampai pada posisi akhir tahun 2017. Dengan kata lain, komponen tabungan berjangka menurun sebesar 1,09 persen.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Ternate saat ini masih lebih memilih menabung dalam bentuk tabungan daripada menyimpan uang mereka dalam bentuk giro atau deposito. Dengan alasan kuat bahwa uang yang disimpan dalam bentuk tabungan dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu jangka waktu lama seperti halnya giro dan deposito.

Gambar 4.2. Kontribusi Jenis Simpanan (Giro, Tabungan, Deposito) terhadap Total Simpanan di Kota Ternate, 2017 (persen)



Sumber : *Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, diolah*

Pada tahun 2017, jenis simpanan tabungan memberikan kontribusi paling besar terhadap penghimpunan dana pihak ketiga di Kota Ternate yaitu sebesar 61,48 persen. Kemudian urutan kedua adalah simpanan berjangka (deposito) sebesar 27,50 persen. Sementara itu, simpanan dalam bentuk giro memiliki kontribusi paling kecil yakni sebesar 11,02 persen. Diagram tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Kota Ternate lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan.

Tabel 4.1. Jumlah Aktiva Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Dati II di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2017 (Juta Rp)

Dati II	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Ternate	5.839.402	5.884.231	6.852.770
Kota Tidore Kepulauan	894.200	1.024.988	1.162.269
Kab. Halmahera Utara	796.497	908.168	-
Kab. Halmahera Barat	278.380	300.358	239.379
Kab. Halmahera Selatan	201.703	209.109	225.894
Kab. Kepulauan Sula	178.193	221.874	-
Kab. Halmahera Tengah	-	-	1.057.301
Jumlah	8.188.375	8.548.728	10.021.242

Sumber : *Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara*

Tabel 4.2. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah & Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Simpanan di Kota Ternate Tahun 2015 – 2017 (Juta Rp)

Jenis Simpanan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Giro	651.886	376.809	470.311
Deposito	995.237	1.185.452	1.172.331
Tabungan	2.307.856	2.296.444	2.621.119
Jumlah	3.954.979	3.858.705	4.263.760

Sumber : *Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara*

BAB 5 HOTEL DAN PARIWISATA

V. HOTEL DAN PARIWISATA

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar, tak terkecuali Kota Ternate yang memiliki potensi wisata alam dan sejarah. Oleh karena itu, kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan.

Sektor pariwisata merupakan *invisible export* karena kemampuannya mendatangkan devisa. Pendapatan daerah sektor pariwisata berasal dari belanja wisatawan baik domestik maupun asing yang berkunjung Kota Ternate. Untuk itu Pemerintah Kota Ternate terus berupaya membenahi/mengembangkan baik sarana dan prasarannya dalam rangka meningkatkan daya tarik wisatawan baik domestik maupun asing untuk berkunjung ke Kota Ternate. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan Kota Ternate yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata sejarah/budaya serta wisata bahari di wilayah Maluku Utara, salah satu infrastruktur pendukung yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata adalah perhotelan.

5.1. Perkembangan Perhotelan

Jumlah fasilitas hotel dan akomodasi lainnya di Kota Ternate sampai dengan tahun 2017 tercatat oleh BPS Kota Ternate sebanyak 73 hotel/penginapan. Menurut klasifikasi BPS, jumlah hotel berbintang sebanyak 3, sedangkan jumlah hotel non bintang atau penginapan sebanyak 70. Hotel dan penginapan tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni kecamatan ternate selatan, ternate tengah, dan ternate utara. Jumlah hotel/penginapan yang tercatat oleh BPS meningkat dibandingkan

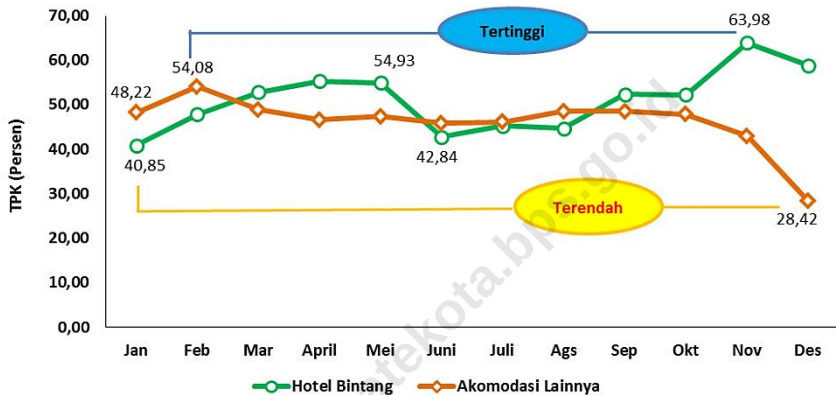
dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 67 buah (data tahun 2013).

Pada tahun 2017 tercatat jumlah kamar yang tersedia sebanyak 325 kamar yang bisa dipesan oleh tamu hotel berbintang, dan 1.314 kamar pada hotel non bintang dan penginapan. Jumlah kamar pada hotel berbintang lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain jumlah kamar, juga tercatat jumlah tempat tidur yang tersedia yakni sebanyak 571 tempat tidur pada hotel berbintang dan 1.687 tempat tidur pada hotel non bintang atau penginapan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hotel non bintang dan penginapan masih mendominasi jumlah akomodasi yang tersedia di Kota Ternate.

5.2. Tingkat Penghunian Kamar (TPK)

Salah satu indikator atau ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat hunian di Kota Ternate adalah tingkat penghunian kamar (TPK). Tingkat penghunian kamar (TPK) merupakan perbandingan antara jumlah kamar yang dihuni dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel. Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas hotel. Pada tahun 2017, TPK untuk hotel berbintang tertinggi pada Bulan November yaitu sebesar 63,98 persen sedangkan akomodasi lainnya (termasuk hotel non bintang) tertinggi pada Bulan Februari sebesar 54,08 persen. Meskipun demikian, TPK pada tahun 2017 juga pernah mengalami titik terendah. Pada hotel berbintang, TPK terendah terjadi pada Bulan Januari yaitu sebesar 40,85 persen. Sementara, TPK terendah pada akomodasi lainnya terjadi pada Bulan Desember dengan nilai TPK sebesar 28,42 persen.

Gambar 5.1. TPK Kota Ternate menurut Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya, 2017



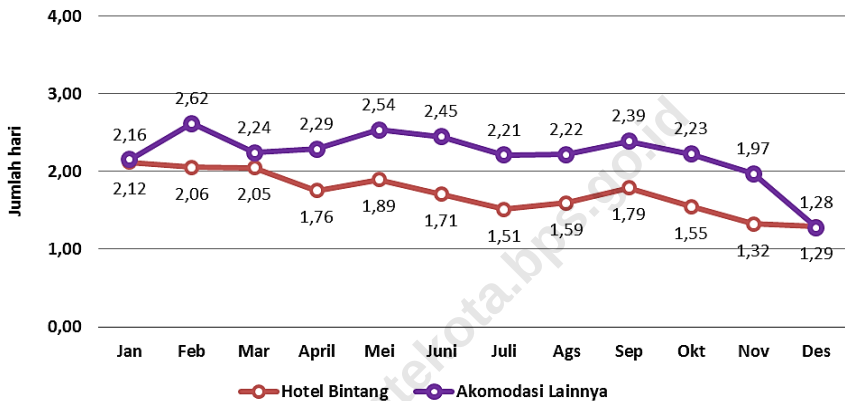
Sumber : BPS, diolah

5.3. Rata-rata Lama Menginap

Indikator berikutnya adalah rata-rata lama menginap tamu atau 'average length of rate'. Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) adalah jumlah malam tempat tidur yang digunakan dibagi dengan jumlah tamu hotel. Rata-rata lama menginap tamu dapat digunakan untuk mengukur durasi/lama menginap oleh tamu pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Pada tahun 2017 rata-rata lama tamu untuk menginap pada hotel berbintang dan akomodasi lainnya baik oleh tamu domestik maupun asing yakni berkisar 1–3 hari. Jika dilihat menurut klasifikasi hotel, pada tahun 2017 rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang berkisar 1-3 hari. Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu di akomodasi lainnya juga berkisar 1-3 hari.

Gambar 5.2 Rata-rata Lama Menginap Tamu di Kota Ternate menurut Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya, 2017



Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 5.2 juga dapat diperoleh informasi bahwa rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang terlama yakni pada Bulan Januari yaitu 2,12 hari dan waktu terpendek pada Bulan Desember yaitu 1,29 hari. Sementara pada akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu dengan jangka waktu terpendek yakni pada Bulan Desember yaitu 1,28 hari, sedangkan rata-rata lama menginap terlama pada Bulan Februari yaitu 2,62 hari.

Tabel 5.1. Jumlah Hotel/Penginapan dan Kamar Menurut Kecamatan di Kota Ternate, 2017

Kecamatan	Hotel/ Penginapan	Kamar	Tempat Tidur
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Ternate	-	-	-
Moti	-	-	-
Pulau Batang Dua	-	-	-
Ternate Selatan	18	463	758
Ternate Tengah	53	1.152	1.470
Ternate Utara	2	24	30
Jumlah	73	1.639	2.258

Sumber : Hasil Updating Direktori Hotel BPS Kota Ternate

Tabel 5.2. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) menurut Klasifikasi Hotel/Akomodasi di Kota Ternate Tahun 2017

Bulan	Klasifikasi Hotel/Akomodasi	
	Hotel Berbintang	Akomodasi Lainnya
(1)	(3)	(4)
Januari	40,85	48,22
Pebruari	47,83	54,08
Maret	52,81	48,89
April	55,30	46,64
Mei	54,93	47,37
Juni	42,84	45,82
Juli	45,32	46,13
Agustus	44,68	48,50
September	52,38	48,56
Oktober	52,25	47,85
November	63,98	42,96
Desember	58,86	28,42

Sumber : BPS, diolah

Tabel 5.3. Rata-rata Lama Menginap Tamu (Asing dan Domestik) dirinci menurut Klasifikasi Hotel/Akomodasi di Kota Ternate Tahun 2017

Bulan	Klasifikasi Hotel/Akomodasi	
	Hotel Berbintang	Akomodasi Lainnya
(1)	(3)	(4)
Januari	2,12	2,16
Pebruari	2,06	2,62
Maret	2,05	2,24
April	1,76	2,29
Mei	1,89	2,54
Juni	1,71	2,45
Juli	1,51	2,21
Agustus	1,59	2,22
September	1,79	2,39
Oktober	1,55	2,23
November	1,32	1,97
Desember	1,29	1,28

Sumber : BPS, diolah

BAB 6 SEKTOR PERHUBUNGAN

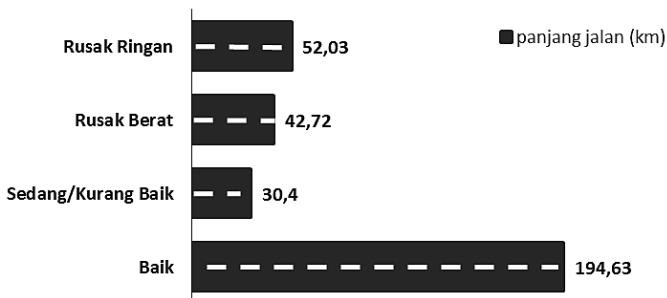
VI. PERHUBUNGAN

Sektor perhubungan merupakan sektor yang mempunyai peran penting bagi kegiatan ekonomi lainnya. Sebagai sarana penunjang, sektor perhubungan dituntut mampu memberikan dukungan bagi perkembangan sektor lainnya. Distribusi barang dan jasa sangat membutuhkan sarana perhubungan untuk menjangkau wilayah pemasaran yang ingin dicapai. Tanpa sarana perhubungan secara memadai, roda perputaran ekonomi akan sulit bergerak stabil, dimana akhirnya akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.

6.1. Perhubungan Darat

Kelancaran perhubungan darat banyak bergantung pada tersedianya ruas jalan yang memadai. Panjang jalan Kota Ternate tahun 2017 sekitar 319,77 km yang terdiri dari 196,14 km jalan hotmix, 78,30 km jalan lapen, 31,72 km jalan tanah, 12,86 km jalan paving, dan 0,75 km jalan sirtu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, panjang jalan Kota Ternate masih tetap sama.

Gambar 6.1 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Kota Ternate (km), 2017



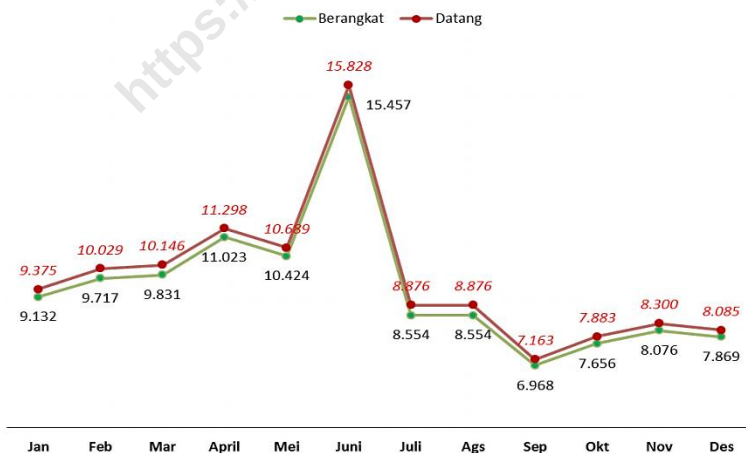
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate

Bila dirinci menurut kondisi jalannya, maka jalan dengan kondisi baik 194,63 km (60,86 %), kondisi jalan kurang baik 30,40 km (9,51 %), jalan kondisi rusak ringan sepanjang 52,03 km (16,27 %), dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 42,72 km (13,36 %).

6.2. Perhubungan Laut

Angkutan laut merupakan salah satu sarana angkutan antar pulau yang sangat penting apalagi di Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan, perhubungan laut sangat memegang peranan yang besar untuk mengantar barang maupun memperlancar arus pergerakan (mobilitas) penduduk.

Gambar 6.2 Lalu Lintas Penumpang Angkutan Laut di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate (orang), 2017



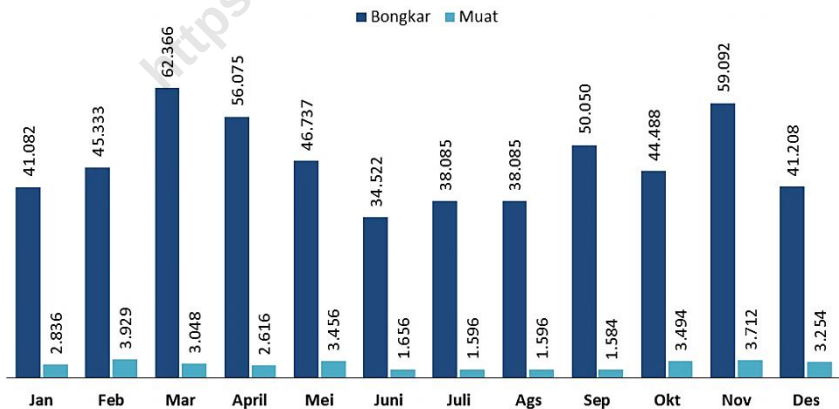
Sumber : PT. Pelindo IV Cabang Ternate, diolah

Adanya kunjungan kapal ke pelabuhan Ahmad Yani Ternate dengan sendirinya terjadi aktifitas penumpang naik dan turun. Jumlah

penumpang yang berangkat (naik) dengan memanfaatkan jasa perhubungan laut pada tahun 2017 tercatat sebanyak 113.261 orang, angka ini mengalami penurunan sebesar 33,13 persen dibandingkan dengan tahun 2016.

Bila dirinci menurut bulan pada tahun 2017, penumpang yang berangkat menggunakan jasa angkutan laut terbanyak pada Bulan Juni yaitu sebesar 15.457 orang. Hal ini disebabkan karena momentum mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017. Sementara jumlah penumpang terendah terjadi pada Bulan September yaitu sebanyak 6.968 orang. Dilihat dari jumlah kedatangan, penumpang yang datang (turun) melalui Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada tahun 2017 tercatat sebanyak 116.548 orang, atau menurun sebesar 32,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 6.3 Arus Bongkar Muat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate (ton), 2017



Sumber : PT. Pelindo IV Cabang Ternate, diolah

Di lain sisi, arus bongkar muat barang angkutan dalam negeri yang terjadi di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada tahun 2017 sebanyak

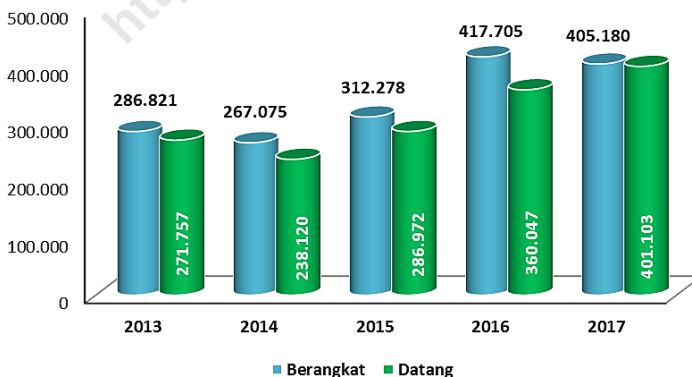
557.123 ton (bongkar) dan 32.777 ton (muat). Kegiatan bongkar di Pelabuhan Ternate paling banyak terjadi pada Bulan Meret 2017 sebanyak 62.366 ton. Sedangkan kegiatan muat paling banyak terjadi pada Bulan Februari 2017 yaitu sebesar 3.929 ton.

6.3. Perhubungan Udara

Salah satu ukuran untuk melihat efektifitas perhubungan udara adalah dengan melihat rasio/perbandingan antara penumpang dengan jumlah penerbangan.

Dalam tabel lampiran disajikan informasi tentang rata-rata penumpang yang berangkat dan yang datang pada setiap kali keberangkatan dan pen-daratan pesawat melalui Bandara Sultan Babullah Ternate.

Gambar 6.4 Arus Penumpang melalui Bandar Udara Sultan Babullah Ternate (orang), 2013-2017



Sumber : Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, diolah

Pada tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata penumpang yang berangkat untuk setiap penerbangan selama 2017 adalah sebesar 72

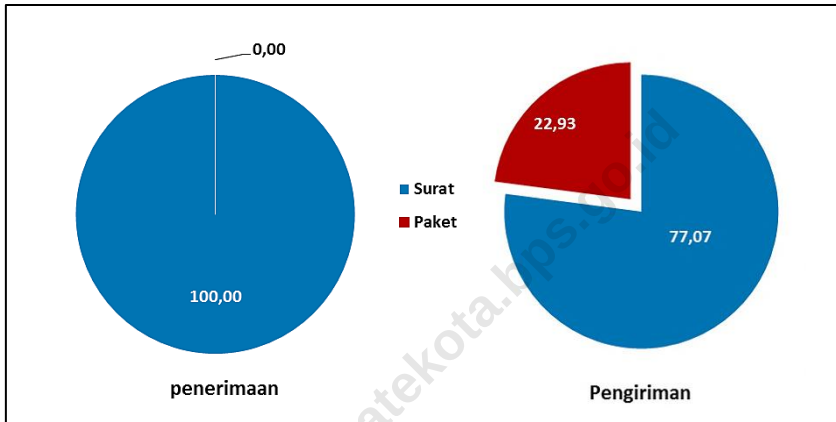
orang. Tahun 2016 setiap penerbangan rata-rata dipenuhi 75 penumpang, untuk setiap penerbangan. Jumlah penumpang yang berangkat mengalami penurunan dari 417.705 orang penumpang pada tahun 2016 menjadi 405.180 orang penumpang pada tahun 2017 atau turun sebesar 2,99 persen.

Sedangkan untuk jumlah penumpang yang datang juga mengalami peningkatan dari 360.047 orang pada tahun 2016 menjadi 401.103 orang pada tahun 2017 atau mengalami kenaikan sebesar 11,40 persen. Disamping arus penumpang, terjadi pula aktivitas bongkar muat barang di Bandar Udara Babullah Ternate. Pada tahun 2016 terjadi penurunan banyaknya bagasi dan kargo yang dibongkar melalui Bandar Udara Babullah sebesar 11,01 persen sedangkan bagasi dan kargo yang dimuat mengalami peningkatan sebesar 9,25 persen dibanding tahun sebelumnya.

6.4. Komunikasi

Walaupun teknologi komunikasi sudah semakin berkembang yang ditandai dengan semakin meluasnya penggunaan telepon genggam, internet, namun komunikasi melalui surat tetap memiliki peran tersendiri. Produksi yang dihasilkan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Ternate selama tahun 2017 sebagian besar melayani jasa pengiriman dan penerimaan surat (surat kilat khusus, surat kilat, surat biasa) sebesar 96,55 persen. Sementara itu, layanan pengiriman dan penerimaan dalam bentuk paket pos (paket kilat khusus, paket kilat, paket biasa) sebesar 3,45 persen.

Gambar 6.5 Persentase Penerimaan dan Pengiriman Surat dan Paket di Kota Ternate (persen), 2017



Sumber : PT. Pos Indonesia Cabang Ternate, diolah

Pada tahun 2017, Kantor Pos Cabang Ternate menerima dalam bentuk surat pos sebanyak 162.225 surat (100 persen dari total penerimaan), sedangkan pada tahun 2017 tidak menerima paket. Sementara itu, banyaknya surat yang dikirim oleh Kantor Pos Cabang Ternate pada tahun 2017 sebanyak 22.165 surat (77,07 persen dari total yang dikirim), sedangkan pengiriman dalam bentuk paket pos sebanyak 6.595 buah (22,93 persen dari total yang dikirim).

Tabel 6.1. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kota Ternate, 2017

Keadaan	Panjang Jalan (km)
(1)	(2)
<i>Jenis Permukaan</i>	
Hotmix	196,14
Lapen	78,30
Tanah	31,72
Sirtu	0,75
Paving/Beton	12,86
<i>Kondisi Jalan</i>	
Baik	194,63
Sedang/Kurang Baik	30,40
Rusak Ringan	52,03
Rusak Berat	42,72

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate

Tabel 6.2. Lalu Lintas Penumpang dan Barang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate Tahun 2017

Bulan	Penumpang (Orang)		Barang (Ton)	
	Berangkat	Datang	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	9.132	9.375	41.082	2.836
Februari	9.717	10.029	45.333	3.929
Maret	9.831	10.146	62.366	3.048
April	11.023	11.298	56.075	2.616
Mei	10.424	10.689	46.737	3.456
Juni	15.457	15.828	34.522	1.656
Juli	8.554	8.876	38.085	1.596
Agustus	8.554	8.876	38.085	1.596
September	6.968	7.163	50.050	1.584
Oktober	7.656	7.883	44.488	3.494
November	8.076	8.300	59.092	3.712
Desember	7.869	8.085	41.208	3.254
Jumlah	113.261	116.548	557.123	32.777

Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ternate

Tabel 6.3. Jumlah Penumpang Datang dan Berangkat Melalui Bandara Sultan Babullah Ternate Tahun 2014 – 2017 (Orang)

Tahun	Penumpang	
	Berangkat	Datang
(1)	(2)	(3)
2014	267.075	238.120
2015	312.278	286.972
2016	417.705	360.047
2017	405.180	401.103

Sumber : *Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, data diolah.*

Tabel 6.4. Jumlah Bagasi dan Kargo yang Dibongkar/Dimuat Melalui Bandara Sultan Babullah Ternate Tahun 2014 – 2017 (Kg)

Tahun	Barang/Kargo		Bagasi	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	2.285.294	1.347.107	2.477.518	2.178.893
2015	2.004.474	1.283.536	3.513.734	2.323.258
2016	1.483.527	940.457	3.427.126	3.000.094
2017	2.887.474	1.203.320	3.317.470	2.602.519

Sumber : *Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, data diolah*

Tabel 6.5. Banyaknya Pesawat Datang dan Berangkat Melalui Bandara Sultan Babullah Ternate Tahun 2014 – 2017 (unit)

Tahun	Pesawat	
	Berangkat	Datang
(1)	(2)	(3)
2014	5.530	5.530
2015	5.728	5.728
2016	5.629	5.633
2017	5.689	5.693

Sumber : *Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, data diolah.*

Tabel 6.6. Jumlah Surat Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Diterima dan Dikirim Kantor Pos dan Giro Ternate Tahun 2017

Uraian	Terima	Kirim
(1)	(2)	(3)
Surat Kilat Khusus	138.026	22.165
Surat Kilat	8.512	0
Surat Biasa	15.687	0

Sumber : PT. Pos Indonesia (Persero), Cabang Ternate

BAB 7

SEKTOR PRODUKSI

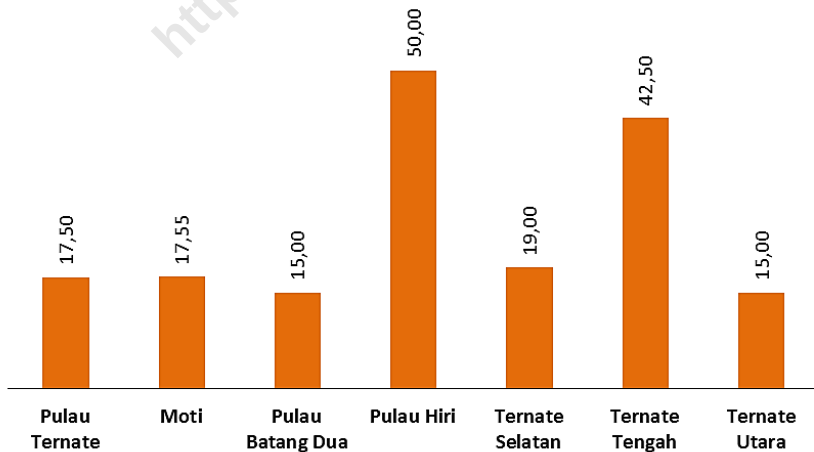
VII. PRODUKSI

7.1. Produksi Tanaman Pangan

Subkategori tanaman bahan makanan merupakan salah satu subkategori pada Kategori A (Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan). Subkategori ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai.

Luas panen komoditi jagung pada tahun 2017 yaitu 75,10 Hektar dengan produksi jagung mencapai 176,55 ton. Sedangkan untuk rata-rata produksinya adalah sekitar 2,35 ton/ha dan meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya memiliki rata-rata produksi sebesar 1,92 ton/ha.

Gambar 7.1. Produksi Jagung menurut Kecamatan di Kota Ternate (ton), 2017



Sumber : Dinas Pertanian Kota Ternate, diolah

Areal panen jagung terluas pada tahun 2016 terdapat di Kecamatan Pulau Hiri dengan luas panen mencapai 25 hektar atau sebesar 33,28 persen dari total luas panen jagung di Kota Ternate.

Luas panen ubi kayu tahun 2017 seluas 49,90 hektar. Sedangkan produksi ubi kayu pada tahun 2017 mencapai 179,90 ton. Areal panen ubi kayu terluas terdapat di Kecamatan Pulau Hiri dengan luas panen 15,50 hektar atau sebesar 31,06 persen dari total luas panen ubi kayu di Kota Ternate.

Ubi jalar pada tahun 2017 memiliki luas panen yaitu 4 hektar dengan produksi sebesar 9 ton. Dimana rata-rata produksinya adalah 2,25 ton/hektar. Sedangkan untuk kacang tanah hanya memiliki luas panen 13,70 hektar dengan produksi sebesar 10,40 ton dimana rata-rata produksinya hanya 0,76 ton/hektar.

7.2. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan terluas di Kota Ternate adalah pala. Sampai dengan tahun 2017 luas lahan yang ditanami jenis tanaman ini mencapai 3.990 hektar. Tanaman lainnya yang memiliki lahan terluas adalah cengkeh dan kelapa dengan luas lahan pada tahun 2017 masing-masing mencapai 1.662 hektar dan 1.035 hektar.

7.3. Populasi Ternak dan Unggas

Secara umum, perkembangan populasi ternak dan unggas di Kota Ternate pada tahun 2017 menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Populasi kambing meningkat dari 21.472 ekor pada tahun 2016 menjadi sekitar 24.692 ekor pada tahun 2017 atau naik sekitar 14,99 persen. Sedangkan populasi ternak sapi tahun 2017 meningkat sekitar 10,73 persen jika dibandingkan dengan

tahun 2016 dimana jumlah sapi pada tahun 2017 sebanyak 3.282 ekor. Untuk jenis unggas, populasi unggas pada tahun 2017 mencapai 330.357 ekor, dimana didominasi oleh jenis unggas ayam pedaging yaitu sebesar 84,63 persen.

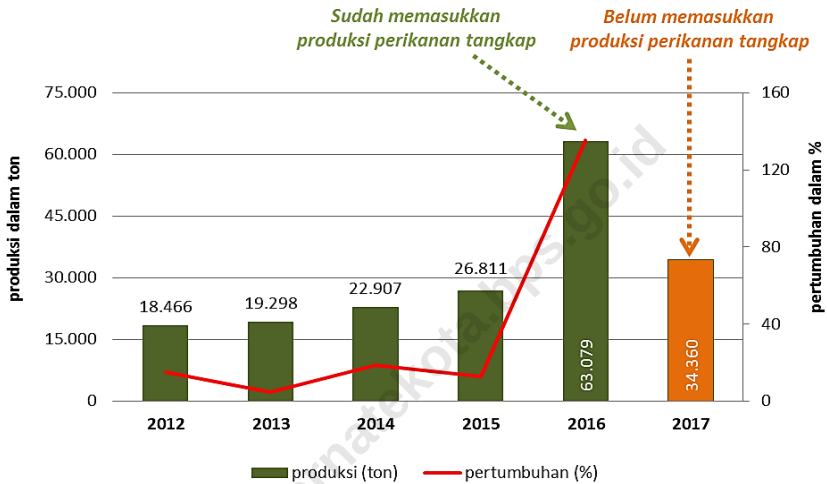
7.4. Produksi Perikanan

Ikan sebagai salah satu bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani merupakan komoditas yang secara umum tersedia di Kota Ternate. Daerah-daerah di Kota Ternate yang sebagian besar memiliki pesisir pantai memungkinkan produksi ikan merata di wilayah ini.

Dari segi produksi, hasil perikanan Kota Ternate didominasi oleh perikanan umum. Secara umum produksi perikanan laut pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan dibandingkan produksi tahun 2016. Produksi perikanan Kota Ternate pada tahun 2016 sebesar 28.723 ton, kemudian naik menjadi 34.360 ton pada tahun 2017 atau naik sebesar 19,42 persen.

Bila dilihat menurut kecamatan, produksi perikanan hasil penangkapan terbesar berasal dari Kecamatan Ternate Utara yaitu sebesar 7.311 ton pada tahun 2017. Kecamatan ini memiliki kontribusi sebesar 21,27 persen dari total produksi perikanan hasil penangkapan di Kota Ternate. Sementara itu, Kecamatan Ternate Tengah merupakan kecamatan yang paling kecil dalam hal produksi perikanan karena sebagian besar wilayahnya terletak bukan di daerah pesisir pantai.

Gambar 7.2. Produksi perikanan dan Pertumbuhannya di Kota Ternate, 2012-2017



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, diolah

Tabel 7.1. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Jagung menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2017

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Ternate	7,00	17,50	2,50
Moti	6,50	17,55	2,70
Pulau Batang Dua	6,00	15,00	2,50
Pulau Hiri	25,00	50,00	2,00
Ternate Selatan	7,60	19,00	2,50
Ternate Tengah	17,00	42,50	2,50
Ternate Utara	6,00	15,00	2,50
Jumlah	75,10	176,55	2,35

Sumber : *Dinas Pertanian Kota Ternate*

Tabel 7.2. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Ubi Kayu menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2017

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Ternate	3,20	11,20	3,50
Moti	1,50	54,00	36,00
Pulau Batang Dua	8,00	24,00	3,00
Pulau Hiri	15,50	62,00	4,00
Ternate Selatan	2,50	8,75	3,50
Ternate Tengah	2,50	8,75	3,50
Ternate Utara	3,20	11,20	3,50
Jumlah	49,90	179,90	3,60

Sumber : Dinas Pertanian Kota Ternate

Tabel 7.3. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Ubi Jalar menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2017

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Ternate	0,00	0,00	0,00
Moti	1,00	2,40	2,40
Pulau Batang Dua	3,00	6,60	2,20
Pulau Hiri	0,00	0,00	0,00
Ternate Selatan	0,00	0,00	0,00
Ternate Tengah	0,00	0,00	0,00
Ternate Utara	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4,00	9,00	2,25

Sumber : *Dinas Pertanian Kota Ternate*

Tabel 7.4. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Kacang Tanah menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2017

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Ternate	1,60	1,20	0,75
Moti	2,50	2,00	0,80
Pulau Batang Dua	3,00	1,95	0,65
Pulau Hiri	0,00	0,00	0,00
Ternate Selatan	2,00	1,50	0,75
Ternate Tengah	3,00	2,55	0,85
Ternate Utara	1,60	1,20	0,75
Jumlah	13,70	10,40	0,76

Sumber : Dinas Pertanian Kota Ternate

Tabel 7.5. Luas Areal Tanaman Menghasilkan Menurut Jenis Komoditi Perkebunan di Kota Ternate Tahun 2017 (Ha)

Jenis Komoditi	Kecamatan							Jumlah
	Pulau Ternate	Moti	Pulau Batang Dua	Pulau Hiri	Ternate Selatan	Ternate Tengah	Ternate Utara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
Kelapa	31,00	82,00	603,00	23,00	5,00	0,00	3,00	747,00
Coklat	1,00	15,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	18,00
Cengkeh	348,00	191,00	142,00	16,00	80,00	141,00	18,00	936,00
Pala	629,00	762,00	1.298,00	21,00	74,00	21,00	11,00	2.816,00
Kayu Manis	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	13,00

Sumber : *Dinas Pertanian Kota Ternate*

Tabel 7.6. Banyaknya Rumah Tangga Pemilik Tanaman Perkebunan menurut Jenis Komoditi di Kota Ternate Tahun 2015

Jenis Komoditi	Kecamatan							Jumlah
	Pulau Ternate	Moti	Pulau Batang Dua	Pulau Hiri	Ternate Selatan	Ternate Tengah	Ternate Utara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
7,5	321	110	212	64	35	10	27	779
Coklat	0	25	0	0	0	0	0	25
Cengkeh	1 224	292	405	45	212	435	47	2.660
Pala	372	371	141	29	57	31	57	1.058
Kayu Manis	0	33	0	28	0	40	20	121

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kota Ternate

Tabel 7.7. Populasi Ternak dan Unggas Dirinci Menurut Jenis Ternak di Kota Ternate Tahun 2016 – 2017 (ekor)

Jenis Komoditi	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Sapi Potong	2.964	3.282
Kambing	21.472	24.692
Babi	250	648
Ayam Kampung <i>Native Chicken</i>	29.523	24.675
Ayam Petelur Layer	315.075	10.000
Ayam Pedaging Broiler	11.500	279.600
Itik/itik Manila Duck/ <i>Muscovy Duck</i>	9.664	12.720

Sumber : *Dinas Pertanian Kota Ternate*

Tabel 7.8. Perkembangan Produksi Perikanan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2013 – 2017 (Ton)

Kecamatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pulau Ternate	2.629	3.121	3.517	5.780	4.309
Moti	2.531	3.004	3.386	5.262	4.148
Pulau Batang Dua	2.081	2.471	2.784	3.097	3.411
Pulau Hiri	2.162	2.566	2.892	3.217	3.544
Ternate Selatan	4.183	4.965	5.595	37.222	6.855
Ternate Tengah	1.252	1.486	1.675	1.863	2.052
Ternate Utara	4.460	5.294	5.967	6.638	7.311
Jumlah	19.298	22.907	26.811	63.079	34.360

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Keterangan : *) belum mencakup perikanan tangkap

BAB 8 KEUANGAN DAERAH

VIII. KEUANGAN DAERAH

8.1. Penjelasan Teknis

1. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, seperti yang tercantum dalam GBHN, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.
2. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota guna merencanakan pembangunan di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan daerah, baik tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan.
3. Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial di daerah tersebut. Dalam hubungan ini

pengelolaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota akan terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

4. Sumber penerimaan daerah dapat berasal dari berbagai macam penerimaan, namun demikian secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Bagian Laba Usaha Daerah
 - d. Penerimaan Lain-lain
 - 2) Dana Perimbangan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
5. Dari ketiga sumber penting penerimaan tersebut, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri, oleh karena itu daerah mempunyai wewenang penuh untuk memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata berarti bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah secara optimal.
6. Sejak tahun 2000 sektor keuangan dihitung berdasarkan atas tahun kalender yang berakhir pada bulan Desember.
7. Mulai tahun 2003 sektor keuangan disusun berdasarkan atas anggaran berbasis kinerja. Dana yang didapat oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dipergunakan untuk membiayai pengeluaran aparatur daerah dan pelayanan publik.

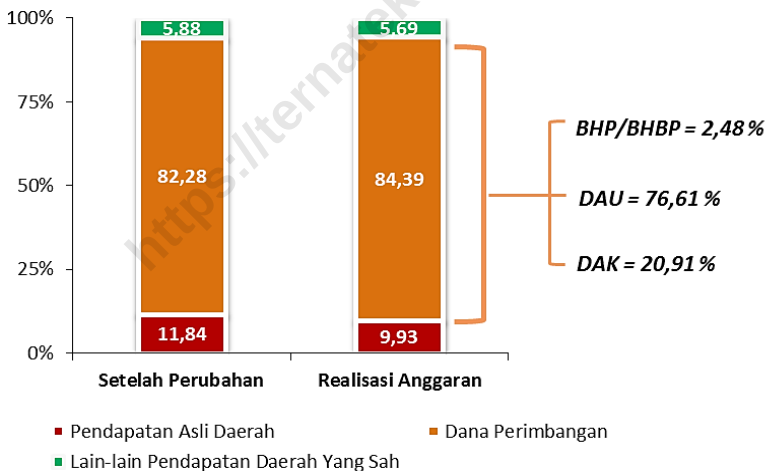
8. Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja berupa Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi, dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya *tidak secara nyata langsung* dinikmati oleh masyarakat (publik)
9. Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja Administrasi Umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya *secara langsung* dinikmati oleh masyarakat (publik).
10. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah asset)
11. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah asset)
12. Belanja Modal/Pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah asset).

8.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate

Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Ternate diupayakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program dan kebijakan pembangunan tidak hanya pada bidang ekonomi juga sosial . Hal ini tentunya harus didukung oleh pembiayaan pembangunan yang memadai. Dimana program unggulan daerah selalu jadi *mainstream* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian antara potensi penerimaan dan alokasi pembiayaan pembangunan haruslah dapat dioptimalkan dan disinergikan, sehingga pada akhirnya tujuan mensejahterakan rakyat dapat tercapai. Realisasi anggaran pendapatan pada APBD Kota Ternate tahun 2017 mencapai 944,24 milyar rupiah atau mengalami perubahan 5,05 persen dari rencana penerimaan anggaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu 991,36 milyar rupiah.

Gambar 8.1 Persentase Komponen pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Ternate, Tahun 2017



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ternate, diolah

Berdasarkan Gambar 8.1, dapat dijabarkan bahwa komponen anggaran pendapatan daerah Kota Ternate ada 3 (tiga) komponen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Mengacu pada gambar tersebut, terlihat bahwa komponen anggaran terbesar berasal dari dana perimbangan

yang mencapai 84,39 persen atau 796,8 milyar rupiah (realisasi anggaran). Sedangkan bagian penerimaan yang berasal dari PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah serta pendapatan lain-lain yang sah adalah sebesar 93,75 milyar rupiah atau 9,93 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah sebesar 53,68 milyar atau sekitar 5,69 persen.

Pada Gambar 8.1 juga dapat dilihat bahwa komponen Dana Perimbangan Kota Ternate terbagi menjadi 3 (tiga) unsur, yakni Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (BHP/BHBP), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan Kota Ternate sebagian besar berasal dari DAU yakni 76,61 persen. Sementara, sisanya berasal dari BHP/BHPB sebesar 2,48 persen dan DAK sebesar 20,91 persen.

Dari sisi pengeluaran, total belanja APBD (realisasi) Kota Ternate tahun 2017 mencapai 943,44 milyar rupiah. Pengeluaran terbesar terjadi pada pos belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal sebesar 541,64 milyar rupiah atau 57,41 persen dari total realisasi belanja, kemudian disusul oleh pos belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial) sebesar 401,80 milyar rupiah atau 42,59 persen dari total realisasi belanja.

Tabel 8.1. Ringkasan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2017 (Rupiah)

Uraian	Jumlah	
	Setelah Perubahan	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Daerah	991.364.444.519	944.243.999.955
Belanja Daerah	1.031.362.818.519	943.433.566.560
Pembiayaan Netto	39.998.374.000	(8.190.061.200)

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ternate*

Tabel 8.2. Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2017 (Rupiah)

Uraian	Jumlah	
	Setelah Perubahan	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah	117.400.328.450	93.755.330.223
Hasil Pajak Daerah	46.150.000.000	45.516.684.750
Hasil Retribusi Daerah	28.207.870.850	16.816.067.938
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.200.000.000	573.704.420
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.842.457.600	30.848.873.115
Dana Perimbangan	815.706.786.000	796.804.528.491
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	27.662.832.000	19.732.647.141
Dana Alokasi Umum	610.438.912.000	610.438.912.000
Dana Alokasi Khusus	177.605.042.000	166.632.969.350
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	58.257.330.069	53.684.141.240
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
Jumlah	991.364.444.519	944.243.999.955

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ternate*

Tabel 8.3. Ringkasan Anggaran Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2017 (Rupiah)

Uraian	Jumlah	
	Setelah Perubahan	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Belanja Tidak Langsung	429.018.545.726	401.792.667.129
Belanja Pegawai	384.666.736.006	364.884.713.309
Belanja Bunga	-	-
Belanja Hibah	18.351.200.000	11.267.000.000
Belanja Bantuan Sosial	18.867.500.000	18.505.154.000
Belanja Bantuan Keuangan	813.109.720	813.109.720
Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	6.322.690.100
Belanja Langsung	602.344.272.793	541.640.896.431
Belanja Pegawai	101.146.231.320	94.184.157.799
Belanja Barang & Jasa	281.559.371.284	256.242.997.494
Belanja Modal	219.638.670.189	191.213.741.138
Jumlah	1.031.362.818.519	943.433.566.560

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ternate*

**Tabel 8.4. Ringkasan Pembiayaan Daerah Kota Ternate Tahun 2017
(Rupiah)**

Uraian	Jumlah	
	Setelah Perubahan	Realisasi
(1)		
Penerimaan Pembiayaan	42.998.374.000	(5.190.061.200)
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000
Pembiayaan Netto	39.998.374.000	(8.190.061.200)

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ternate*

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2018. *Indeks Pembangunan Manusia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Indeks Harga Konsumen 82 Kota di Indonesia (2012=100) 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2011-2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TERNATE**

Jl. Cengkeh Afo No. 262 Kelurahan Markurubu Telp./Fax : (0921) 3121650, Ternate
e-mail : bps8271@bps.go.id ; bps8271@gmail.com